

**PENGARUH KEMISKINAN DAN ANGGARAN PENDIDIKAN
TERHADAP ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH DI
INDONESIA**

NADIRA ZAHRA

8105150537



*Building
Future
Leaders*

**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2019**

THE INFLUENCE OF POVERTY AND EDUCATION BUDGET TO ENROLLMENT RATES IN INDONESIA

NADIRA ZAHRA

8105150537



*Building
Future
Leaders*

**The Thesis is Written as Part of Bachelor Degree in Economic Education
Accomplishment**

**ECONOMIC EDUCATION STUDY PROGRAM
FACULTY OF ECONOMICS
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA
2019**

ABSTRAK

Nadira Zahra, Pengaruh Kemiskinan dan Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indoneisa. Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemiskinan dan anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data panel yang menggabungkan metode time series dan cross section. Data time series yang digunakan dalam penelitian ini dalah pada tahun 2015-2018 dan data cross section yang digunakan adalah 34 provinsi di Indoneisa. Data yang digunakan merupakan data tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan Kemdikbud. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan menggunakan random effect. Model persamaan regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini adalah $\text{LogAPS} = 1,88125 - 0,028739 \text{ LogKMS} + 0,004825 \text{ LogAGP}$. Hasil analisis secara parsial menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh positif terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Hasil analisis secara simultan menunjkan bahwa kemiskinan dan anggaran pendidikan bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Variasi pengaruh kedua variabel bebas menunjukkan nilai R^2 sebesar 0.557. Nilai tersebut menunjukkan 55% variasi angka partisipasi sekolah dipengaruhi oleh kemiskinan dan anggaran pendidikan. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

Kata Kunci: Angka partisipasi sekolah, kemiskinan, anggaran pendidikan

ABSTRACT

*Nadira Zahra, **The Influence of Poverty and Education Budget to Enrollment Rates in Indonesia.** Economic Education Study Program Faculty Of Economics State University Of Jakarta 2019.*

This research aims to review the influence of poverty and education budget against enrollment rates in Indonesia. The methodology used in this research is using data panels that combine a method of time series and cross section. Time data series used in this research was 2015-2018 in cross section and data used is 34 provinces in Indonesia. The data used annual represents data obtained from BPS, and kemdikbud. This study using data regression models panel using random effect. Model the regression equation is linear used in this research was $\text{LogAPS} = 1,88125 - 0,028739 \text{ LogKMS} + 0,004825 \text{ LogAGP}$. The results of the analysis in partial showed poverty have a negative influence on of enrollment rates in Indonesia. The results of the analysis in partial showed that education budget have had a positive impact on of enrollment rates in Indonesia. The results of the analysis simultaneously that poverty and budget education together influential in significant impact on of enrollment rates in Indonesia. Variations of the influence of the second set free show 0.557. r^2 value of The value of the show 55 % variation enrollment rates affected by poverty and. education budget While the rest are influenced by other factors outside model research.

Keywords: Enrollment Rates, Poverty, Education Budget

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Judul : PENGARUH KEMISKINAN DAN ANGGARAN
PENDIDIKAN TERHADAP ANGKA PARTISIPASI
SEKOLAH DI INDONESIA

Nama : NADIRA ZAHRA

Nomor Registrasi : 8105150537

Program Studi : PENDIDIKAN EKONOMI

Menyetujui,
Koordinator Program Studi
Pendidikan Ekonomi,

Suparno, S.Pd, M.Pd
NIP 197908282014041001

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
------	--------------	---------

Dosen Pembimbing I

Dr. I Ketut R. Sudiarditha, M.Si
NIP. 195602071986021001

.....

.....

Dosen Pembimbing II

Dr. Ari Saptono, SE, M.Pd
NIP. 197207152001121001

.....

.....

PERNYATAAN ORSINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupundi Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas tercantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta

Jakarta, Juli 2019

Yang membuat pernyataan

NADIRA ZAHRA
No. Reg. 8105150537

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Alhamdulillah, akhirnya telah melewati masa-masa ini.

Allah Maha Baik, Pemberi pertolongan, dengan memberi episode kehidupan penuh dengan cinta-Nya.

Pada akhirnya, semua akan selesai. Hidup adalah perjuangan, perjuangan membutuhkan pengorbanan.

Akhirnya, Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku, IBU.... AYAH.... Dira lulus, Untuk abangku yang banyak berkorban dan juga kaka ifarku serta tante cantiq om ganteng, jidah dan ema.

Saksi perjalanan penyemangat ku

(Hana, Mbak Rev, Mbak Tami, Ka Rara, Ka Ghina, Ka Ika) masa kuliah yang benar-benar cepat sakali.

Saksi Bisu Perjalan Menuju Kampus, TJ Koridor 13.. Kamu hadir di waktu yang tepat.

Alhamdulillah...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirata Allah SWT karena atas segala nikmat dan rahmat yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kemiskinan dan Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pada program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Dalam menyusun laporan ini, peneliti banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
2. Bapak Suparno, S.Pd, M.Pd, selaku Ketua Prodi Pendidikan Ekonomi.
3. Bapak Dr. I Ketut Sudiarditha, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memberikan saran serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ari Saptono, S.E, M.Pd, selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan saran serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hasan Basri dan Ibu Ida Tusaidah, Orang tua tercinta yang tak pernah lelah berdo'a dan memberikan dukungan yang amat berarti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Raja Nurasima, Ghina Febria, dan Ika Murnia, selaku kaka asuh saat jauh, yang teramat mendukung, dan menyayangi.
7. Teman-teman seperjuangan EKOP 2015 yang telah memberikan banyak semangat serta doa.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan dalam segi penulisan secara teknis maupun penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kebaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Juli 2019

Peneliti,

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORETIK	
A. Deskripsi Konseptual.....	13
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	31
C. Kerangka Teoretik.....	35
D. Perumusan Hipotesis.....	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	41
B. Metode Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	61
B. Analisis Data.....	67
C. Pembahasan.....	78
D. Keterbatasan Penelitian.....	86

BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	87
B. Implikasi.....	88
c. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	90
---------------------	----

LAMPIRAN.....	93
---------------	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Tabel Angka Partisipasi Sekolah.....	4
Tabel II.1 Matriks Jurnal Relevan.....	31
Tabel IV.1 Statistik Deskriptif.....	62
Tabel IV. 2 Statistik Deskriptif Angka Partisipasi Sekolah.....	62
Tabel IV. 3 Statisik Deskriptif Kemiskinan.....	64
Tabel IV. 4 Statistik Deskriptf Anggaran Pendidikan	65
Tabel IV. 5 Hasil Uji Chow.....	67
Tabel IV. 6 Hasil Uji Hausmen.....	68
Tabel IV. 7 Hasil Uji LM.....	69
Tabel IV.8 Uji Multikolinearitas.....	71
Tabel IV.9 Uji Heterokedesitas.....	72
Tabel IV. 10 Uji Autokorelasi.....	72
Tabel IV.11 Hasil Model Random Effect.....	73
Tabel IV. 12 Hasil Uji t Kemiskinan.....	74
Tabel IV. 13 Hasil Uji t Anggaran Pendidikan.....	75
Tabel IV. 14 Hasil Uji F	77

Tabel IV.. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	78
Tabel IV. 16 Nilai Koefisien Antar Variabel.....	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.....	3
Gambar I.2 Angka Partisipasi Sekolah.....	4
Gambar I.3 Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi.....	8
Gambar I.4 Anggaran Pendidikan.....	9
Gambar IV. 1 Presentase Angka Partisipasi Sekolah.....	63
Gambar IV. 2 Presentase Kemiskinan.....	65
Gambar IV.3 Anggaran Pendidikan.....	66
Gambar IV. 4 Hasil Uji Normalitas.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran1 Data Penelitian.....	91
Lampiran 2.Data Penelitian dalam bentuk Log.....	95
Lampiran 3. Statistik Deskriptif Data.....	98
Lampiran 4. Model <i>Comen Effect</i>	99
Lampiran 5. Model <i>Fix Effect</i>	99
Lampiran 6. Model <i>Random Effect</i>	100
Lampiran 7. Uji Chow.....	101
Lampiran 8. Uji Hausmen.....	102
Lampiran 9. Uji LM.....	103
Lampiran 10. Uji Normalitas.....	103
Lampiran 11. Uji Multikolinearitas.....	104
Lampiran 12. Uji Heteroskedesitas.....	104
Lampiran 13. Uji Autokorelasi.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

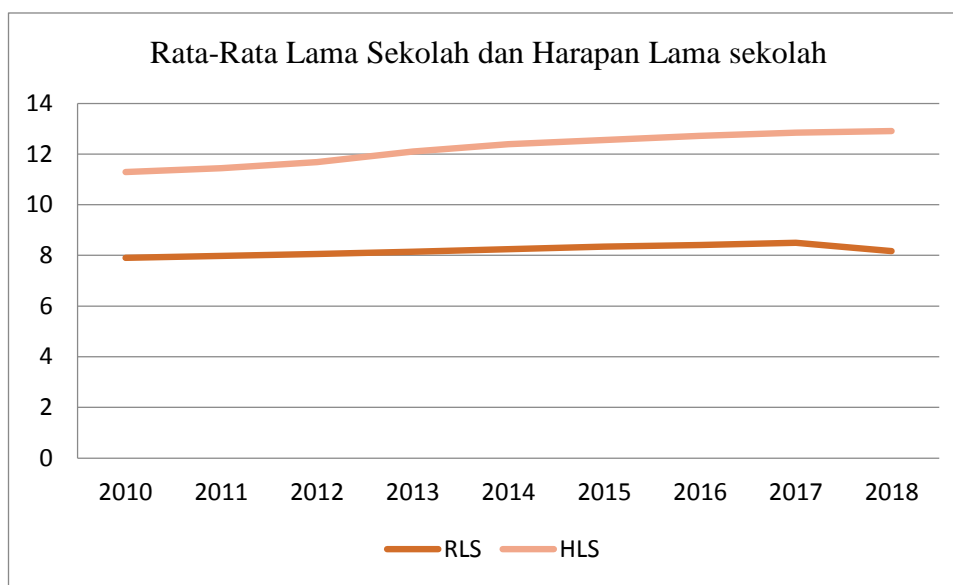
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk dengan jumlah yang padat. Menurut World Bank (2018) Indonesia menduduki peringkat empat dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 263,991,379 jiwa. Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar tentu memiliki banyak keuntungan, salah satunya yakni dengan melimpahnya Sumber Daya Manusia. Namun permasalahan timbul ketika Sumber Daya Manusia yang dimiliki tidak memiliki kualitas yang baik. Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah investasi bagi suatu Negara. Sumber Daya Manusia yang berkualitas memberikan keuntungan bagi suatu Negara. Artinya Negara yang maju ialah Negara yang memiliki penduduk dengan tingkat kualitas yang baik.

Salah satu cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dapat melalui pendidikan. Secara operasional, upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya (Mulyadi, 2003). Sektor pendidikan adalah bagian yang krusial dalam tujuan pembangunan suatu Negara. Tidak dapat dipungkiri melalui sektor pendidikan sebagai penyumbang besar kemajuan suatu Negara. Pendidikan adalah kunci untuk realisasi sebagian besar target tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pendidikan sebagai alat pengembangan ditegakkan oleh sebagian besar ahli teori pembangunan sebagai hal yang esensial dalam perkembangan setiap masyarakat. Pendidikan adalah bentuk usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah guna mempersiapkan Sumber daya Manusia yang berkualitas agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1).

Pendidikan sebagai pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah dan di luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat (Mudyahardjo, 2008). Pendidikan dijadikan sebagai pendongkrak kemajuan masa depan suatu negara. Berbagai upaya telah dicoba oleh pemerintah demi meningkatkan kualitas serta pemerataan pendidikan. Dalam upaya peningkatan mutu serta pemerataan pendidikan dan tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bahwa salah satu tujuan pembangunan adalah tercapainya pendidikan bagi seluruh anak Indonesia dan penurunan kesenjangan pendidikan antarwilayah. Pemerintah telah

mencanangkan program wajib belajar yaitu pasal 6 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 terkait usia wajib belajar 7 s.d. 15 tahun (wajib belajar 9 tahun). Hingga berkembang menjadi wajib belajar 12 tahun.



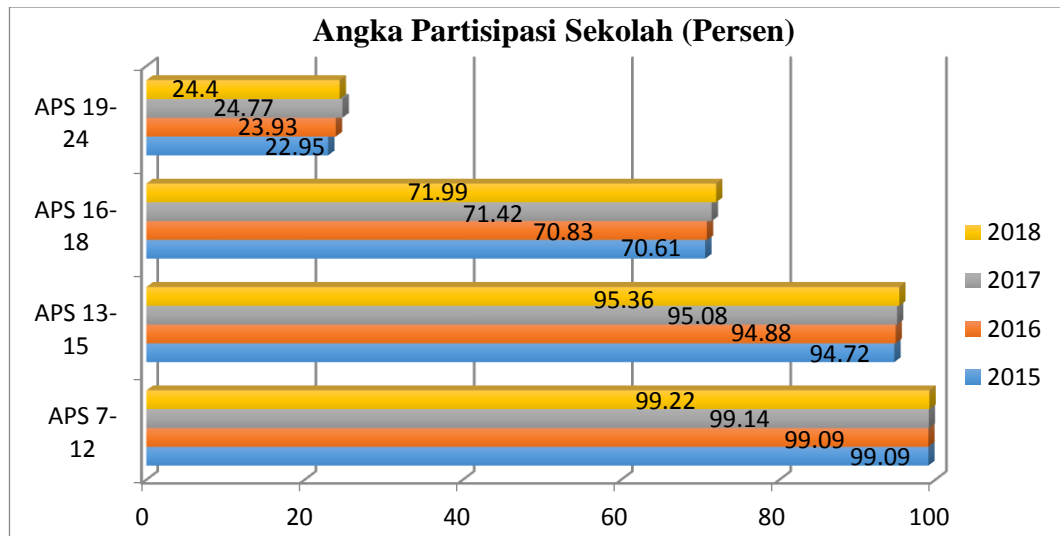
Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Gambar I.1
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan grafik di atas, bahwa harapan pemerintah dapat terlaksana dari harapan lama sekolah yakni samapai 12 tahun dan dari grafik tersebut menunjukkan bahwa angka hampir mendekati lama sekolah 9 tahun, dan masih jauh dari angka 12 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa target pemerintah belum dikatakan berhasil. Meskipun Program Wajib Belajar Sembilan tahun sudah berjalan di Indonesia, tetapi masih terdapat persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti masih banyaknya angka putus sekolah dan angka tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Selain itu indikator pendidikan dikatakan merata atau tidak dapat dilihat seberapa besar partisipasi sekolah yang disumbangkan untuk kemajuan suatu bangsa. Melalui angka partisipasi sekolah dapat dilihat seberapa besar gambaran

secara umum penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Tentunya sebagai dasar untuk melihat seberapa banyak anak Indonesia diberbagai belahan provinsi yang dapat mengenyam pendidikan. Tugas pemerintah memastikan bahwa peserta didik dapat menajaki pendidikan sampai pada jenjang yang lebih tinggi.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Gambar I.2
Grafik Angka Partisipasi Sekolah dalam (Persen)

Data di atas merupakan presentase Angka Partisipasi Sekolah di mana untuk jenjang usia 7-12 tahun terlihat sudah hampir memenuhi target, sedangkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil angka partisipasi sekolah. Menurut data BPS persebaran angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diberbagai jenjang kelompok usia pendidikan. Bahwa presentase angka partisipasi sekolah tidak memiliki laju angka presentase yang baik, hanya saja sedikit meningkat. Pemerataan pendidikan belum dapat diwujudkan terlebih untuk jenjang pendidikan 16-18 tahun dan 19-24 tahun. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil partisipasi sekolah, dikarenakan RPJM pemerintah adalah tujuan pembangunan wajib belajar 9 dan bahkan 12 tahun, yakni terdapat

kesenjangan pada salah satu jenjang pendidikan, maka difokuskan kepada kelompok usia partisipasi sekolah 16-18 tahun. Berdasarkan hasil Susenas oleh BPS menunjukkan wilayah-wilayah yang memiliki angka partisipasi sekolah di bawah rata-rata angka partisipasi sekolah Nasional. Seperti pada beberapa wilayah yang tidak memiliki persebaran partisipasi sekolah yang tidak begitu baik. Menandakan masih menjadi tugas pemerintah di berbagai belahan Provinsi yang memiliki presentase angka partisipasi sekolah dibawah rata-rata angka partisipasi nasional. Pada tahun 2018 dimana wilayah yang memiliki presentase paling rendah antara lain provinsi Papua, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Banten yang memiliki presentase partisipasi tidak lebih dari 68% dan masih banyak beberapa daerah provinsi lainnya.

Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, semakin kecil angka partisipasi sekolah yang disumbangkan. Maka tidak selalu meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti pendidikan seluruh daerah merata. Maka sebaiknya pendidikan perlu diperhatikan jika masih banyak daerah yang kecil presentase partisipasi sekolahnya artinya program pemerintah dalam sektor pendidikan belum berhasil. Belum berhasil dikarenakan tinggi rendahnya mutu pendidikan dilihat sejauh mana pemerataan pendidikan untuk anak Indonesia. Selain itu Putus Sekolah juga sebagai salah satu alasan rendahnya partisipasi sekolah. Putus Sekolah menurut Gunawan (2010) memberikan pengertian bahwa putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Semakin besar usia

sekolah, semakin besar pula angka putus sekolah. Terlebih kepada usia yang menjajaki 16 tahun ke atas. Seperti yang dikutip dari (POJOKJABAR.com, 2017) 17 ribu siswa di kota bogor putus sekolah, dikarenakan tidak adanya dukungan dari orang tua untuk bersekolah, melainkan memacu anak-anak untuk membantu mencari uang.

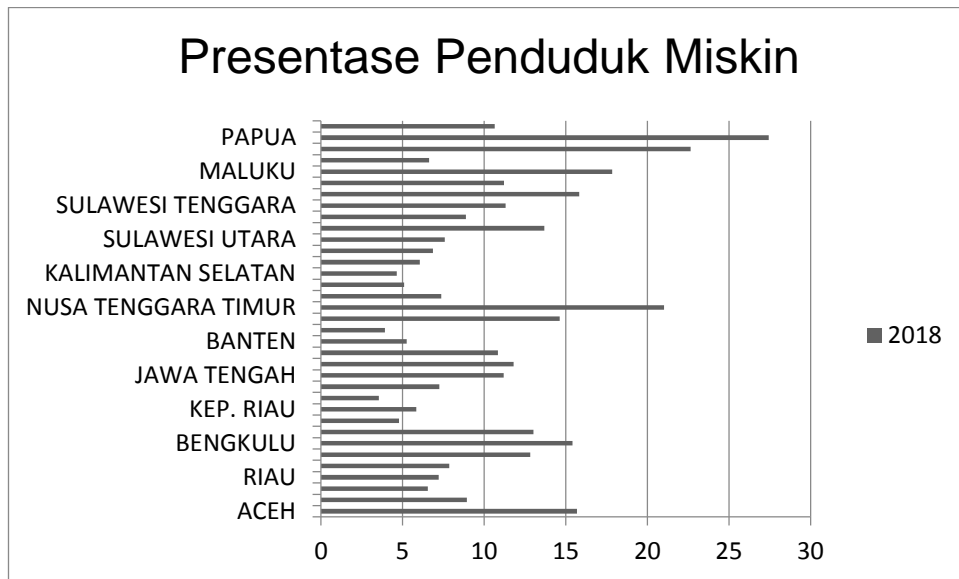
Besar kecilnya angka prtisipasi sekolah tidak terlepas dari faktor latar belakang ekonomi keluarga, seperti tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu faktor sebab anak tidak dapat melanjutkan atau terhenti sekolahnya. Sebahagian anak yang tidak bisa bersekolah dikarenakan, kemiskinan yang kian merekat. Kemiskinan yang masih saja menjadi alasan masyarakat Indonesia untuk berhenti bersekolah. Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin rendah angka partisipasi sekolah, karena kemiskinan membatasi anak untuk dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kemiskinan sangat berkaitan erat dengan pendidikan. Karena apabila kemiskinan juga tidak dapat dituntaskan maka dapat berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistika (2017) merupakan keadaan seorang individu atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standar tertentu. Pendidikan disandarkan kepada besar kecilnya tingkat ekonomi keluarga tersebut, apabila tingkat ekonomi memiliki output yang besar maka anak dari keluarga tersebut dapat bersekolah dan sebaliknya apabila output keluarga tersebut tidak begitu baik tingkatannya maka anak tersebut tidak dapat

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau bahkan bisa sampai tidak melanjutkan sekolah sehingga mengalami putus sekolah.

Tinggi rendahnya latar belakang ekonomi berkaitan erat dengan kemiskinan. Partisipasi sekolah sangat dipengaruhi dengan latar belakang ekonomi terutama dari sisi kesejahteraan keluarga. Anak yang terlahir dari keluarga miskin tidak mudah dalam melanjutkan untuk bersekolah dan bahkan terlampau sulit hingga memutuskan menjadi pekerja anak usia dini. Menjadi pekerja anak usia dini didukung dengan latar belakang ekonomi keluarga yang tidak menguntungkan.

Kemiskinan menjadi salah satu faktor tidak dapatnya melanjutkan pendidikan, karena apabila suatu keluarga memutuskan untuk memberikan pendidikan kepada anaknya maka bersedia untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk pendidikan. Jika tidak memiliki biaya yang cukup untuk pendidikan maka terhambatlah jenjang pendidikannya. Terlebih pendidikan digolongkan sebagai kebutuhan setelah sandang dan pangan. Jika suatu golongan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan primer maka digolongkan sebagai golongan yang berpeghasilan rendah dan sebahagian kasus tidak dapatnya melanjutkan sekolah dikarenakan ketretbatasan ekonomi.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

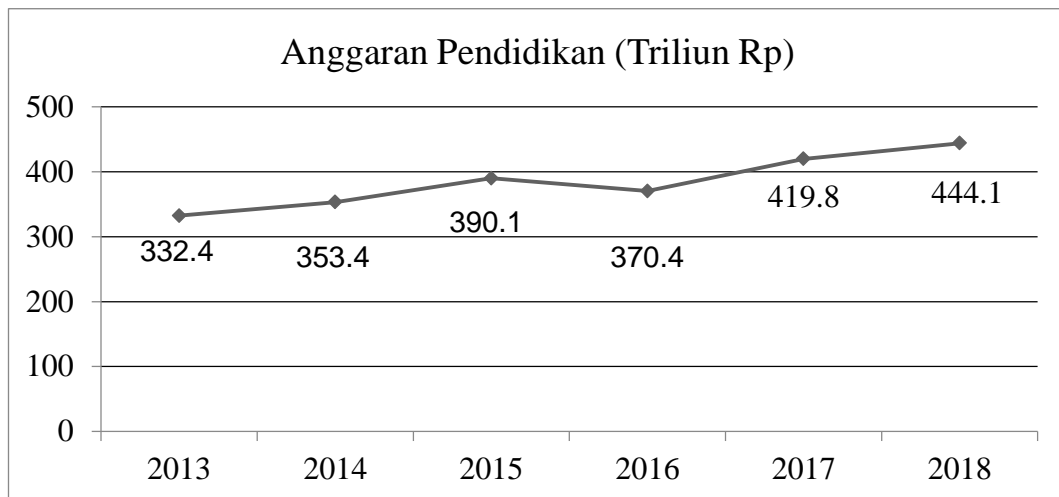
Gambar I.3

Grafik Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)

Berdasarkan data kemiskinan Jumlah masyarakat miskin pada tahun 2018 dimana masih banyak wilayah dengan jumlah presentase penduduk miskin di atas rata-rata presentase penduduk miskin 10.64 %. Artinya dengan masih banyaknya penduduk miskin maka semakin banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Kawasan miskin memiliki ciri-ciri indeks pendidikan yang rendah karena tingginya biaya pendidikan dan rendahnya pendapatan membuat penduduk miskin kesulitan dalam memperoleh pendidikan (Manarung, 2015).

Meskipun pemerintah berupaya untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi masih ada banyak daerah provinsi yang jumlah masyarakat miskin masih tergolong tinggi otomatis masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Menaikan jumlah presentase angka partisipasi sekolah selain menekan jumlah penduduk miskin, pemerintah juga berupaya melalui anggaran pendidikan. Salah satu faktor yang dapat menaikkan jumlah angka partisipasi sekolah adalah

anggaran pendidikan. Permasalahan latar belakang ekonomi keluarga yang menjadi faktor keputusan untuk bersekolah atau tidak. Menjadikan pemerintah terus bergerak dengan menambahkan anggaran pendidikan disetiap tahunnya.



Sumber : Kementerian Keuangan 2018

Gambar I.4

Grafik Anggaran Pendidikan (Triliun)

Data menunjukkan anggaran pendidikan yang mana Pemerintah menyediakan dana yang dianggarkan untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN, yang setiap tahunnya dana tersebut selalu di naikan anggarannya. Jika anggran tersebut dinaikan maka tiadak ada lagi cerita anak pelosok yang tidak dapat bersekolah karena alasan ketidakadaan biaya. Permasalahan yang cukup kompleks pemerintah sudah berupaya menaikkan anggaran pendidikan namun masih saja menjadi kendala ketidakadaan biaya untuk bersekolah. Pengalokasian anggaran pendidikan dari pusat disalurkan untuk daerah, apakah sudah bersistem dengan baik atukah tidak. Menjadikan kendala untuk pemerintah program pendidikan menaikkan angka partisipasi sekolah. Seperti yang dikutip dalam (CNN Indonesia, 2019) Dilema

Anggaran Jumbo Pendidikan Minim Hasil. Meningkatnya anggaran pendidikan belum mampu memperbaiki partisipasi sekolah.

Pemerataan pendidikan belum dapat diwujudkan terlebih untuk jenjang pendidikan 16-18 tahun, mengingat Angka Partisipasi Sekolah menurun setiap bertambahnya usia. Sebahagian masyarakat usia sekolah yang tidak dapat mengenyam pendidikan dikarenakan faktor kemiskinan, selain itu juga keterbatasan biaya, dan umumnya terjadi pada tingkatan usia sekolah 16-18 tahun yang memiliki tingkat presentase partisipasi sekolahnya yang sedikit. Maka dari itu dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pengaruh kemiskinan dan anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan perumusan Masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kemiskinan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia ?
2. Apakah terdapat pengaruh anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia ?
3. Apakah terdapat pengaruh kemiskinan dan anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dipercaya (Shaih, Benar, dan Valid) dan (Dapat Diadalkan, Reliabel) tentang :

1. Pengaruh Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia
2. Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia
3. Pengaruh Kemiskinan dan Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan informasi dalam bidang pendidikan ekonomi khususnya mengenai seberapa besar pengaruh kemiskinan dan anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah. Penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dengan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dan dapat berguna untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan sreta menamabah referensi yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1). Menurut Mudyahardjo (2008) mengenai pendidikan sebagai berikut :

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah dan di luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.

Sedangkan Suryadi (2002) menyatakan bahwa pendidikan adalah faktor pendorong untuk mempercepat perubahan struktur ekonomi dan ketenagakerjaan. Ungkapan tersebut di dukung dengan pernyataan Faguet dan Sanchez (2006) yang menyatakan keberhasilan pendidikan dapat diketahui menggunakan kenaikan partisipasi sekolah sebagai indikator *outcomes*. Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu tujuan yang diperhatikan demi meningkatkan kulaitas suatu bangsa, melalui partisipasi sekolah untuk melihat keberhasilan di dalam bidang pendidikan.

a. Definisi Partisipasi

Partisipasi memiliki beragam penekanan makna, mulai dari partisipasi masyarakat, politik, maupun dalam pendidikan. Dimana masing-masing penekan maknanya memiliki arti yang serupa yaitu sebagai pemberi keputusan untuk dapat memberikan kontribusi yang berpengaruh dan dapat memberikan sebuah perubahan dalam pencapaian yang berarti.

Berbagai pendapat ahli yang mengemukakan makna dari partisipasi. Partisipasi menurut Suryono (2001) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Sedangkan menurut Soegarda Poerbakawatja (1981) tentang partisipasi sebagai berikut :

partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

Maka dari ungkapan di atas dapat disimpulkan secara sederhana partisipasi adalah pengikutsertaan atau ikutsertanya seseorang maupun kelompok dalam memberikan kontribusinya serta dapat menikmati hasilnya dan keterlibatannya tersebut dalam program yang memiliki andil serta tanggung jawab. Pendapat ahli lain seperti yang diungkapkan Djalal (2001) sebagai berikut:

Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi dapat diputuskan berdasarkan dari dorongan orang maupun kelompok yang memberikan rangsangan atau stimulus dalam upaya memberikan pengaruh dalam mengambil sebuah keputusan.

Selain itu I Nyoman sumaryadi mengatakan (2010) :

partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Sama halnya yang diungkapkan Sumaryadi dengan Tilaar (2009) yang menyatakan partisipasi sebagai berikut :

Partisipasi adalah wujud dari kegiatan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan definisi Sumaryadi dan Tilaar partisipasi merupakan bentuk kegiatan yang diwujudkan kelompok atau masyarakat dalam memberikan saran atau agar dapat memberikan pengaruh dalam sebuah keputusan, yang sebelum mengambil keputusan dapat melalui proses perencanaan guna mendapatkan tujuan yang telah direncanakan. Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Menurut Sundariningrum dalam (Sugiyah, 2001) menyatakan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- b. Partisipasi langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- c. Partisipasi tidak langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Berdasarkan cara keterlibatannya partisipasi langsung turun secara langsung dan memberikan masukan, namun apabila tidak langsung maka melalui perantara dalam menyampaikan hal yang dimaksudkan. Pendapat lain disampaikan oleh Cohen dan Uphoff dalam (Dwiningrum, 2011) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu :

- a. partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- b. partisipasi dalam pelaksanaan.
- c. partisipasi dalam pengambilan manfaat.
- d. partisipasi dalam evaluasi.

Berdasarkan pendapat ahli di atas terkait tingkatan dan jenis partisipasi itu sendiri sama-sama berperan dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan ketika program yang dicanangkan dilakukan, dan selanjutnya partisipasi dalam evaluasi, untuk mengathui apakah sudah tepat sasaran dalam perencanaan untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah direncanakan. Menurut bentuknya partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi dalam (Dwiningrum, 2011) terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal :

Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana

setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Ungkapan yang disampaikan para ahli tentang berbagai jenis, maupun bentuk partisipasi itu sendiri berdasarkan kepada peran masyarakat ataupun kelompok dalam program yang terlibat langsung atau tidak langsung sebagai bentuk pengaruh dalam kemajuan suatu program yang perannya tersebut sangat diperhitungkan. Menurut Mikkelsen (1999) ada tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi yaitu:

- a. Kepemimpinan
Faktor pertama proses pengendalian usaha ditentukan sekali oleh kepemimpinan.
- b. Pendidikan
Faktor kedua tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi dan memudahkan bagi pengembangan identifikasi terhadap tujuan program.
- c. Komunikasi
Faktor ketiga gagasan-gagasan, kebijaksanaan dan rencana-rencana akan memperoleh dukungan bila hal tersebut mudah diketahui dan dimengerti oleh masyarakat.

Berdasarkan ungkapan ahli di atas faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah kepemimpinan sebagai pengendali dalam suatu kegiatan, serta tingkat pendidikan yang dianggap sangat penting guna memudahkan dalam pengembangan program, dan komunikasi yang tidak kalah penting sebagai sarana dalam menyampaikan saran serta masukan, partisipasi tidak terlepas dari peran masyarakat yang mumpuni, partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan dapat dilihat lebih jelasnya Depdiknas mempertegas (2001), bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain:

- a. Pengawasan terhadap anak-anak.
- b. Tenaga yaitu sebagai sumber atau tenaga sukarela untuk membantu mensukseskan wajib belajar dan pelaksanaan KBM, serta memperbaiki sarana-prasarana baik secara individu maupun gotong-royong.
- c. Dana untuk membantu pendanaan operasional sekolah, memberikan bea siswa, menjadi orang tua asuh, menjadi sponsor dalam kegiatan sekolah dan sebagainya.
- d. Pemikiran yaitu memberikan masukan berupa pendapat, pemikiran dalam rangka menjaring anak-anak usia sekolah, menanggulangi anak-anak putus sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Depatemen Pendidikan Nasional menegaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan tentunya sangat memperhatikan pendidikan yang sebagai bentuk upaya dukungan untuk program pemerintah, dan salah satu diantaranya adalah mensukseskan wajib belajar, pemerataan pendidikan, sarana dan prasarana, ketersediaan guru, serta dana pendidikan, dilakukan hal tersebut demi menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi sekolah. Menurut Basrowi (Dwiningrum, 2011) partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, Yaitu:

- a. Partisipasi fisik
Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.
- b. Partisipasi non fisik
Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Berdasarkan pendapat Basrowi di atas keberhasilan peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan program pendidikan dapat dilihat

partisipasi secara fisik yang tentunya mendukung secara nyata dalam proses pemerataan pendidikan, dengan menyelenggarakan program sekolah, dan usah-usaha yang tentunya dapat mendukung program pendidikan, serta bentuk non fisik membantu pemerintah dalam menegaskan pentingnya pendidikan, mendukung partisipasi sekolah dengan menyekolahkan anak keluarga mereka. Menurut Nurhayati (2008) Keberhasilan peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat diukur dengan beberapa indikator berikut:

- a. Kontribusi/dedikasi *stakeholders* meningkat dalam hal jasa (pemikiran/keterampilan), finansial, moral dan material/barang.
- b. Meningkatnya kepercayaan *stakeholders* kepada sekolah terutama menyangkut kewibawaan dan kebersihan.
- c. Meningkatnya tanggungjawab *stakeholders* terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk peningkatan mutu pendidikan.
- e. Meningkatnya kepedulian *stakeholders* terhadap setiap langkah yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu.
- f. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh sekolah benar-benar mengekspresikan apresiasi dan pendapat *stakeholders* dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan

Berdasarkan indikator di atas bahwa partisipasi pendidikan membutuhkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung partisipasi sekolah dan arah pendidikan yang lebih baik. Mutu pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah seberapa mertaaya mutu pendidikan demi meningkatkan partisipasi sekolah anak. seperti yang diungkapkan Dewi (2015) partisipasi dalam pendidikan yaitu sebagai berikut :

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menjadi indikator untuk mengetahui kemajuan pendidikan di suatu daerah. Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikannya melalui seberapa besar angka partisipasi sekolah.

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah (APS), maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Rumus dalam menghitung angka partisipasi sekolah adalah sebagai berikut:

APS (7-12) = $\left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100\% \right\}$

APS (13-15) = $\left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100\% \right\}$

APS (16-18) = $\left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100\% \right\}$

APS (19-24) = $\left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 19-24 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk umur 19-24 tahun}} \times 100\% \right\}$

Menurut BPS (2018) Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

BPS sendiri membedakan Angka partisipasi sekolah menjadi dua jenis yaitu Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni. Angka Partisipasi Kasar adalah Proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan

jenjang pendidikan tersebut digambarkan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK). Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK jenjang tersebut akan lebih dari 100. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya siswa yang sekolah walupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya pengulangan kelas pada siswa.

Angka Partisipasi Murni (APM) yang mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Berdasarkan beberapa pengertian yang diungkapkan dari berbagai pendapat ahli terkait angka partisipasi sekolah maka dapat disintesisikan bahwa angka partisipasi sekolah adalah pengikutsertaan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pemerintah seperti program pendidikan yang dapat diukur dengan presentase penduduk kelompok usia tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang sesuai.

B. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya yang tak kalah pentingnya seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana tidak dapat memenuhi kebutuhan dari segi kesehatan dan juga pendidikan. Menurut KBBI Kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Seperti Stevenson mengungkapkan (2010) kemiskinan yaitu :

Kemiskinan sebagai poor atau dapat diartikan sebagai *having a money few possession; not having enough money for the basic things that people need to live properly*, yang diartikan tidak memiliki cukup uang untuk hal-hal dasar bahwa orang perlu untuk hidup dengan benar.

Sama halnya dengan ungkapan Nallari dan Griffith (2011) Menyatakan, kemiskinan mengandung dua bentuk kausal dalam menafsirkan kata miskin, yaitu miskin memiliki jumlah yang sangat kecil dari sesuatu dan miskin sebagai tidak baik dalam segi kualitas maupun kondisi. Kemiskinan didefinisikan Kumalasari (2011) yaitu :

Kemiskinan adalah keadaan terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut bahwa umumnya kemiskinan adalah kekurangan dari segi ekonomi dan yang memiliki penghasilan rendah atau bahkan tidak memiliki penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Pendapat yang hampir sama dengan Sajogyo dalam (Prayitno, 1986), menyatakan

bahwa kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat, berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

Adapun Suparlan (1995) menyatakan kemiskinan sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Sama halnya yang diungkapkan suparlan dengan ungkapkan Berg (2001) sebagai berikut :

Kemiskinan merupakan istilah yang terkait pengertian relative maupun absolut. Seseorang atau keluarga dianggap miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan mereka atau akses mereka terhadap barang atau jasa relative rendah dibandingkan orang lain dalam perekonomian.

Dari ungkapan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah keadaan rendahnya standar hidup, dan tingkat ekonomi yang rendah dibawah rata-rata tingkat ekonomi golongan masyarakat yang lainnya yang ditetapkan berdasarakan kebutuhan pokok pangan. Menurut Dwi (2010) kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Lain halnya yang dinyatakan oleh Sudantoko dan Muliawan (2009) Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat karena pengaruh kebijakan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yaitu kondisi dimana masyarakat yang sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari disebabkan kebijakan dari pemerintah yang belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia.

Dalam konteks pendidikan, Harniati (2010) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomis seseorang dalam memenuhi

kebutuhan dasarnya, salah satunya untuk mengakses pendidikan. Sama seperti yang dinyatakan Harniati dengan Suharto (2004) menyatakan secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan masyarakat. Sementara, Menurut Nirwana (2013), kemiskinan memiliki hubungan dengan bermacam-macam faktor, mencakup pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang-barang, letak geografis, gender, suku, dan keadaan keluarga.

Berdasarkan pendapat para ahli soal kemiskinan yang memiliki andil dalam pendidikan bahwa ketidakmampuan suatu golongan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya berdampak pada kebutuhan pendidikannya sebab dalam memenuhi kebutuhan dasar masih tidak dapat mencukupi, terlebih untuk kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang terutama bidang pendidikan, selain pendidikan juga masalah pembangunan yang ditimbulkan dari kemiskinan seperti yang dinyatakan Mulfred (2008) menunjukkan bahwa kemiskinan di seluruh dunia merupakan masalah besar dan memiliki hubungan terhadap pendidikan.

Adapun ungkapan Sarwar (2011) menyatakan bahwa kemiskinan adalah rintangan utama mencapai pembangunan ekonomi. Menurut tujuan pembangunan dan pendidikan untuk semua kemiskinan bisa dihilangkan dengan pendidikan. Sama seperti keduanya Mubyarto (1998) juga berpendapat :

kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dalam bentuk rendahnya pendapatan dan disebabkan oleh rendahnya ketrampilan, produktivitas, pendapatan, lemahnya nilai tukar produksi dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa kemiskinan sebagai masalah yang sangat genting karena dengan masalah kemiskinan dapat menghambat pendidikan yang bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk berinvestasi Sumber Daya Manusia, yang kelak sangat diperhitungkan dalam tujuan pembangunan, kemiskinan secara tidak langsung dapat menghambat tujuan pembangunan terutama peranan dalam pendidikan. Menurut Nur Kholis (2014) Kemiskinan dapat dibedakan menjadi beberapa pengertian yaitu:

1. Kemiskinan absolut berkaitan dengan seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.
2. Kemiskinan relative berkaitan erat dengan seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Berdasarkan jenis kemiskinan yang dinyatakan Nur Kholis maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dibedakan menjadi dua kemiskinan absolut yang mana masyarakatnya memiliki penghasilan dibawah rata-rata, dan kemiskinan kultural sekelompok masyarakat yang tidak mau memperbaiki kehidupannya untuk lebih baik. Adapun suatu daerah dapat dikatakan miskin menurut Ginanjar (1996) menjelaskan bahwa kemiskinan suatu daerah dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Pertama, *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang kronis atau turun-temurun. Daerah seperti ini umumnya merupakan daerah-daerah yang krisis sumber daya alamnya, atau daerah yang terisolasi.
2. Kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang meliputi pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
3. Ketiga, adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musim seperti sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan.

4. Keempat adalah *eccidental proverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak daerah suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Berdasarkan pola kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat kemiskinan yang terjadi turuan, kemiskinan yang terjadi karena arah perekonomian, kemiskinan yang terjadi karena musim dari mata pencaharian, dan kemiskinan yang terjadi akibat bencana alam. Menurut BPS (2017) Indikator dalam mendeskripsikan kondisi kemiskinan di suatu wilayah.

1. BPS menetapkan berapakah Garis Kemiskinan (GK) di suatu wilayah.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

2. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain

Konsep kemiskinan dikemukakan secara lebih operasional oleh BPS (2016), yakni kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari

sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun nonmakanan. Seseorang atau rumah tangga dikatakan miskin bila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disintesis bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana sekelompok atau golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau bahkan tidak memiliki penghasilan sekalipun. Serta daerah yang digolongkan miskin yang disebabkan dari keadaan miskin turun temurun, musim pencaharian, dan akibat bencana alam, dari oleh sebabnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, pakaian, kesehatan, dan pendidikan.

4. Anggaran Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu program pemerintah yang tertanam dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan:

Dana pendidikan selain dana pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan 20% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Program pendidikan yang berkualitas dapat terwujud apabila pemerintah dapat memberikan sarana dan prasarana yang baik tanpa adanya beban yang membebani masyarakat, terutama dalam pembiayaan pendidikan. Seperti yang

disampaikan Supriadi (2010) menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyediaan pendidikan. Sama halnya seperti yang diungkapkan Supardi dengan Ghozali (2004) yang menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan nilai uang dari sumber daya pendidikan yang dibutuhkan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, untuk menghitung biaya pendidikan harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya pendidikan termasuk kualifikasi atau spesifikasi untuk dapat menyelenggarakan pendidikan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan secara sederhana biaya pendidikan dijadikan sebagai komponen yang sangat penting, dengan adanya biaya pendidikan dapat membantu masyarakat dalam menyetujui pendidikan dan tentunya dapat menunjang program pemerintah agar mencapai tujuan. Biaya Pendidikan itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua kategori menurut Todaro dan Smith (2006), ada dua biaya pendidikan, yaitu :

biaya pendidikan langsung individual dan biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan langsung individual inilah yang berkenaan langsung dengan pendapatan per kapita masyarakat. Biaya pendidikan langsung individual adalah biaya yang ditanggung siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya oportunitas yang ditanggung karena memilih untuk sekolah, bukan alternatif lain, misalnya bekerja.

Dari ungkapan ahli di atas, bahwa biaya pendidikan dibedakan menjadi dua yakni biaya langsung biaya yang dikeluarkan langsung untuk memperoleh pendidikan sedangkan biaya pendidikan tidak langsung adalah biaya peluang yang didapatkan, apabila memilih untuk bersekolah. Menurut (kemenkeu, 2017)

Komponen anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan atau Anggaran merupakan satuan kegiatan yang dirancang dengan program yang telah disahkan dalam kurun waktu tertentu dan pada umumnya dinyatakan dalam kuantitatif atau bisa dalam satuan uang. Defenisi anggaran atau budget menurut Munandar (2001) yaitu : Suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran merupakan alat untuk merencanakan dan mengendalikan keuangan dalam penyusunannya dilakukan secara periodik. Pengertian lain dari anggaran menurut Nafarin (2007) menyatakan bahwa Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai suatu kegiatan yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Sedangkan menurut Garrison dan Noreen (2000) mendefinisikan anggaran sebagai berikut : Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu.

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh para ahli di atas maka dapat di simpulkan Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis

dalam mengelola sumber daya keuangan yang dirancang dalam kurun (periode) waktu tertentu. Lebih lanjut seperti yang diungkapkan Mulyasa (2002) Yakni :

Anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan system yang berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan keuangan (*fiscal*), serta didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan proses pendidikan dan hasil sekolah yang direncanakan. Ada dua bagian dalam penganggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Perkiraan dan penyajian pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat direalisasikan.

Berdasarkan yang diungkapkan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan suatu mekanisme yang berkaitan dengan program pemerintah dalam pendidikan yang terbagi atas penerimaan dan pengeluaran yang berfungsi dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Dua bagian yang paling penting adalah pendapatn dan pengeluarn yang dapat dipertanggungjawabkan agar tujuan yang direncanakan tercapai. Lain halnya yang diungkapan Djalal (2001) mengemukakan bahwa paling tidak ada tiga pengertian tentang anggaran pendidikan.

Pertama, anggaran untuk sektor pendidikan. Selain untuk anggaran pendidikan masyarakat umum, dalam pengertian ini juga termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh departemen lain selain Depdiknas.

Kedua, anggaran Depdiknas, yaitu anggaran pendidikan nasional yakni semua anggaran pembangunan.

Ketiga, anggaran pendidikan nasional, yakni semua anggaran pendidikan di semua departemen, termasuk anggaran rutin untuk gaji PNS dan biaya rutin operasional lembaga. Tidak setiap rencana kerja organisasi dapat disebut sebagai anggaran. Karena, anggaran memiliki beberapa ciri khusus yang memebedakan dengan sekedar rencana.

Berdasarkan ungkapan ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran pendidikan memiliki tiga pengertian anggaran pendidikan, anggaran pendidikan untuk sektor pendidikan masyarakt umum, kedua anggaran Depdiknas semua

anggaran untuk pembangunan, dan anggaran pendidikan nasional semua anggaran pendidikan di semua departemen. Lanjut seperti yang diungkapkan Mudrajad (2013) Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diantaranya adalah pendidikan. Menurut Meier dalam (Winarti, 2014) Anggaran pendidikan adalah :

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi, semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia kerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan

Berdasarkan ungkapan para ahli di atas maka dapat disintesis bahwa anggaran pendidikan adalah suatu sistem yang mengatur keuangan dalam bidang pendidikan yang telah diatur berdasarkan undang-undang, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, yang dilain sisi berperan dalam membantu meralisasikan program pemerintah dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan, seperti biasanya anggaran pendidikan dirancang dalam kurun waktu atau periode tertentu.

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel II.1

Matriks Jurnal Relevan

No.	Identitas Jurnal	Judul Penelitian	Hubungan antar Variabel			Kesimpulan
			Y	X ₁	X ₂	
1	Jolianis, 2015 <i>Journal of Economic and Education Vol.3 No.2 (169 - 184)</i> ISSN: 2302 – 1590 E-ISSN: 2460 – 190X	Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	√		√	Terdapat pengaruh dari anggaran sektor pendidikan ,pendapatan perkapita, tingkat pendidikan kepala keluarga terhadap angka partisipasi sekolah.
2	Khairunnisa, Sri Hartoyo, dan Lukytawati Anggraeni <i>Vol. 15 No. 1 Juli 2014: 91-112 p-</i> ISSN 1411-5212; e-ISSN 2406-9280	Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat Determinant of Junior Secondary School Enrollment Rate in West Java	√	√		PDRB per kapita, pendidikan orang tua, dan kemiskinan merupakan faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah.

3	Victoria A. Namukwaya, Mediterranean <i>Journal of Social Sciences Vol 5 No 8 May 2014</i> Doi:10.5901/mjss .2014.v5n8p423	Factors Affecting Primary School Enrolment and Retention of Pupils in Kotido District, Uganda	√		faktor terkait budaya: gaya hidup pastoral, nilai-nilai budaya yang kuat, sikap negatif terhadap pendidikan dan keterlibatan dalam pekerjaan rumah tangga, karakteristik sosial ekonomi dan faktor lingkungan mempengaruhi partisipasi dan retensi di sekolah.
4	Pilih Karini , <i>Jurnal Pendidikan – Vol. 10, No. (2018)</i> ISSN: 2087-9490 (p); 2597-940X (o)	Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16—18 Tahun Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	√	√	Terdapat pengaruh kemiskinan terhadap angka partisipasi sekolah (APS).
5	Mihaela Mihai, Emilia, Daniela Manea. <i>Procedia Economics and Finance 32 (2015)</i>) 855 – 860 , doi: 10.1016/S2212-5671(15)01532-4	Education and Poverty	√	√	Terdapat korelasi tingkat kesejahteraan terhadap pendidikan yang dapat dan meningkatkan pendidikan

6	<p>Riad Cempaka Sari, 2013</p> <p>SKRIPSI</p>	<p>Penentuan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah Dengan Pendekatan Regresi Spasial (Studi Kasus: 26 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011)".</p>	√	√	<p>Terdapat prngaruh rasio jumlah guru terhadap jumlah penduduk usia sekolah, persentase kemiskinan, dan Fasilitas Pendidikan Terhap angka partisipasi sekolah</p>
7	<p>Mawuli Gaddah a, Alistair Munro b, Peter Quartey ,</p> <p><i>International Journal of Educational Development</i> 46 (2016) 143–152//dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.11.001 0738-0593</p>	<p>Education subsidy and school enrollments in rural Ghana</p>	√	√	<p>Terdapat pengaruh terdistribusinya tunjangan pendidikan terhadap partisipasi sekolah.</p>
8	<p>G. M. Arif, Najam Us Saqib, Dan G. M. Zahid, 2015 Pakistan</p> <p><i>Institute of Development Economics</i> DOI: 10.30541/v38i4II pp.979-992</p>	<p>Poverty, Gender, and Primary School Enrolment in Pakistan</p>	√	√	<p>Kemiskinan memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pendaftaran sekolah dasar.</p>
9	<p>Behrman, Jere R. Sengupta, Piyali Todd, Petra, 2005</p> <p>Pakistan Institute of Development Economics ISSN:0013-0079 DOI:10.1086/431</p>	<p>Progressing through PROGRESA: An Impact Assessment of a School Subsidy Experiment in Rural Mexico.</p>	√	√	<p>Terdapat pengaruh dalam pemberian subsidi terhadap peningkatan partisipasi sekolah.</p>

	263				
10	Shila Devi, <i>Journal Education Vol.5, No.17, 2014</i> ISSN 2222-1735 ISSN 2222-288X	Determinants of School Enrolment in Pakistan	√	√	Terdapat hubungan positif jumlah sekolah dan pengeluaran pemerintah dengan partisipasi sekolah.
11	Jane Arnold Lincove, 2012 <i>LBJ School of Public Affairs, 3,240 Sid Richardson Hall, 2315 Red River, Austin, TX 78713</i> dx.doi.org/10.101 6	The influence of price on school enrollment under Uganda's policy of free primary	√	√	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peluang untuk tuk memperluas pendidikan melalui transfer tunai dan kebijakan subsidi yang ditargetkan.
12	Mehmet Mirze Baydua, Orhan Kaplanb, Adem Bayarc, <i>Procedia - Social and Behavioral Sciences 84 (</i> <i>2013) 233 – 237</i> doi:10.1016/j.sbs pro.2013.06.541	Facing The Influence of Poverty on Graduation Rates in Public High Schools	√	√	Terdapat hubungan antara kemiskinan dan tingkat kelulusan.

13	Rachel Connelly, Zhenzhen Zheng, <i>Economics of Education Review</i> 22 (2003) 379– 388 doi:10.1016/S027 2-7757(02)00058- 4	Determinants of school enrollment and completion of 10 to 18 year olds in China	√	√	Pendidikan orang tua, jumlah keluarga, tingkat, tarif sekolah memiliki pengaruh yang konsisten pada peningkatan partisipasi sekolah.
14	Ronald Buck, Joe Deutsch, <i>International Journal of Human Science Volume: 11 Issue: 2 Year:2014 ISSN : 1303-5134</i>	Effects of poverty on education	√	√	Kemunduran pendidikan disebabkan oleh kemiskinan.

Sumber : Data diolah oleh penulis 2019

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan, pembaharuan dalam penelitian ini meliputi, sampel yang lebih besar jumlahnya, lokasi, tahun yang berbeda serta penggabungan dua variabel bebas dan metode yang digunakan.

D. Kerangka Teoretik

1. Kemiskinan dan Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah dan di luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Pendidikan amat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan diperlukan guna meningkatkan mutu bangsa

secara menyeluruh. Dalam meningkatkan mutu bangsa di perlukan peranan partisipasi dalam pendidikan yang dapat diukur dari tinggi rendahnya angka partisipasi sekolah. Tinggi rendahnya angka partisipasi sekolah masyarakat tidak terlepas dari latar belakang ekonomi keluarga.

Latar belakang ekonomi menjadi salah satu faktor seorang anak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Tinggi rendahnya pendapatan suatu keluarga, mencerminkan apakah dapat memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti makanan, minuman. Sealian itu ada kesehatan, juga pendidikan. Jika sekelompok keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka dapat dikatakan miskin. Kemiskinan menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak banyak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Partisipasi sekolah yang dapat dipengaruhi oleh sisi permintaan, diantaranya kesejahteraan keluarga seperti kemiskinan. Seperti yang disampaikan, Mulfrod (2008) menunjukkan bahwa kemiskinan di seluruh dunia memiliki hubungan terhadap pendidikan.

Seperti yang dinyatakan Mulfrod tinggi rendahnya tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap dunia pendidikan. Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikannya melalui seberapa besar angka partisipasi sekolah. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam keberlangsungan dunia pendidikan, serta dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah.

2. Anggaran Pendidikan dan Angka Partisipasi Sekolah

Wujud dalam keberhasilan program pemerintah dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pemerintah. Program pemerintah tanpa dukungan masyarakat adalah nihil. Seperti program pemerintah dalam bidang pendidikan. Ukuran tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari rasio jumlah penduduk yang memasuki jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan setiap tahunnya.

Program pemerintah dapat diukung dengan anggaran pendidikan untuk meningkatkan jumlah partisipasi sekolah yang tentunya membenatu dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Menurut Faguet dan Sanchez (2006) jumlah belanja pemerintah bidang pendidikan dengan angka partisipasi sekolah, yang mengindikasikan bahwa semakin besar belanja daerah yang di keluarkan oleh pemerintah pada bidang pendidikan maka akan semakin besar juga tingkat partisipasi sekolah pada daerah tersebut.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran anggaran pendidikan dapat berpengaruh dalam program pendidikan, sebagai penggerak, menjang dan membantu meringakan beban masyarakat dalam hal biaya pendidikan dalam menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Serta peran anggaran pendidikan dalam membantu meralsasikan tujuan pemerintah dalam pemerataan pendidikan yang dapat diukur dengan angka partisipasi sekolah, dan anggran pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah.

3. Kemiskinan, Anggaran Pendidikan, dan Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator dalam melihat pemerataan pendidikan. Sejauh apa upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Meningkatnya angka partisipasi sekolah tidak dapat berarti program pemerintah berhasil, disamping itu terdapat beberapa masalah dengan masih banyaknya usia sekolah yang tidak terserap untuk bersekolah. Umumnya pada masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan.

Meningkatnya angka partisipasi sekolah tidak dapat dikatakan berhasil pengelolaan pemerintah dalam program pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin sedikit presentase angka partisipasi sekolah. Sebab akibatnya seperti kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam mengakses pendidikan. Seperti yang diungkapkan Manurung (2015) menyatakan bahwa kawasan miskin memiliki ciri-ciri indeks pendidikan yang rendah karena tingginya biaya pendidikan dan rendahnya pendapatan membuat penduduk miskin kesulitan dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan bagi penduduk miskin bukan termasuk kebutuhan primer. Tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi diakibatkan dengan faktor latar belakang ekonomi keluarga, pendapatan yang rendah atau bahkan tidak memiliki pendapatan samasekali. Bahkan tidak mampu dalam mewujudkan kebutuhan dasar hidup, salah satunya pendidikan.

Disamping dengan tingkat kemiskinan yang menghambat dalam melanjutkan pendidikan, Juga dengan tingginya biaya pendidikan yang menghambat masyarakat usia sekolah dalam mengenyam pendidikan. Biaya

pendidikan yang tinggi membuat masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan. Upaya pemerintah dalam mengatasi keduanya dengan membeikan anggaran pendidikan. Seperti Joalianis (2015) menyatakan Adanya anggaran yang cukup untuk sektor pendidikan tentunya akan dapat membantu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan sehingga masyarakat akan mendapatkan pendidikan dengan biaya murah dan bahkan kalau bisa adanya pendidikan yang gratis untuk masyarakat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS)

Tingginya biaya pendidikan mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah masyarakat. Anggaran pendidikan yang cukup dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Arze del Granado (2007) menyatakan bahwa yang mempengaruhi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi adalah biaya pendidikan. Pendidikan yang tinggi memerlukan biaya yang lebih tinggi pula, sehingga masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, untuk membiayai sekolah.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah dalam pendidikan dapat dipengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan dan anggaran pendidikan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi angka partisipasi sekolah, karena semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi biaya yang dibutuhkan dan mempengaruhi masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, salah satunya pendidikan.

Kerangka teoretik dalam penelitian ini adalah bahwa angka partisipasi sekolah dapat dipengaruhi oleh faktor kemiskinan dan anggaran pendidikan. Dan variabel tersebut sebagai variabel *independent* atau variabel bebas, dengan variabel *dependent* atau variabel terikatnya yaitu angka partisipasi sekolah dan dengan analisis regresi untuk mendapatkan tingkat signifikansi. Dengan hasil regresi tersebut diharapkan dapat mendapatkan tingkat signifikansi setiap variabel *independent* terhadap variabel *dependent*.

E. Perumusan Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menentukan atau mengarahkan penyelidikan selanjutnya. Berdasarkan deskripsi teoritis dan kerangka berpikir yang sudah diuraikan, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh kemiskinan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia.
2. Terdapat pengaruh anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia.
3. Terdapat pengaruh kemiskinan dan anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

- **Objek Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilaksanakan dengan mengambil data Angka Partisipasi Sekolah, Kemiskinan yang didapat dari Badan Pusat Statistik, dan Anggaran Pendidikan yang didapat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- **Ruang Lingkup Penelitian**

Waktu penelitian diambil dalam rentang empat tahun yaitu dari tahun 2015-2018 waktu tersebut dipilih karena adanya kelengkapan data untuk diteliti. Adapun ruang lingkup penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia.

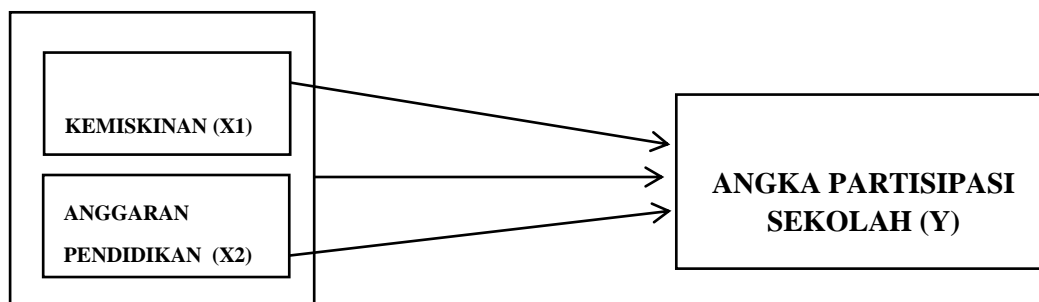
B. Metode Penelitian

1. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Berfungsi sebagai sebagai menjelaskan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi. (Sugiyono, 2003). Metode ini dipilih karena memiliki kriteria yang cocok. Dimana peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka. Bentuk data pustka bersifat siap pakai atau *ready made*. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder sperti yang didapat dari instansi terkait.

2. Konstelasi Hubungan Antar Variabel

Konstelasi pengaruh antar variabel dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan arah atau gambaran dari penelitian ini, yang dapat digambarkan sebagai berikut ;



Keterangan ;

Variabel Bebas (X_1) : Kemiskinan

Variabel Bebas (X_2) : Anggaran Pendidikan

Variabel Terikat (X_3) : Angka Partisipasi Sekolah

—————> : Arah Panah

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang tersedia dalam bentuk angka. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diterbitkan oleh lembaga pengumpul data kepada masyarakat pengguna data. Penelitian ini menggunakan variabel Angka Partisipasi Sekolah sebagai variabel terikat (Y), Kemiskinan variabel bebas (X_1), dan Anggaran Pendidikan variabel bebas (X_2).

Pengumpulan data menggunakan *pooling data* atau biasa disebut dengan data panel, dimana data time series (runtut waktu) dan data *cross section* (deret lintang) digabungkan sehingga jumlah observasi menjadi tahun dikalikan jumlah

provinsi. Data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu, sedangkan *cross section* data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Data *time series* 4 tahun 2015-2018 sedangkan data *cross section* sebanyak 34 provinsi.

2. Sumber Data

Data bersumber dari kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, dan beberapa sumber lain yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

D. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasional variabel penelitian diperlukan untuk memenuhi jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu proses ini dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel.

1. Angka Partisipasi Sekolah (Y)

a. Definisi Konseptual

Angka partisipasi sekolah adalah pengikutsertaan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pemerintah seperti program pendidikan yang dapat diukur dengan presentase penduduk kelompok usia tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang sesuai.

b. Definisi Operasional

Angka partisipasi sekolah yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator dari pendidikan yaitu proporsi penduduk kelompok usia tertentu dan

seluruh jumlah kelompok usia yang sesuai. Data tersebut diterbitkan oleh BPS pada tahun 2015-2018.

2. Kemiskinan (X_1)

a. Definisi Konseptual

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana sekelompok atau golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau bahkan tidak memiliki penghasilan sekalipun. Serta daerah yang digolongkan miskin yang disebabkan dari keadaan miskin turun temurun, musim pencaharian, dan akibat bencana alam, dari oleh sebabnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, pakaian, kesehatan, dan pendidikan.

b. Definisi Operasional

Variabel kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah presentase masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan material maupun nonmaterial. Data tersebut diterbitkan oleh BPS pada tahun 2015-2018.

3. Anggaran Pendidikan (X_2)

a. Definisi Konseptual

Anggaran pendidikan adalah suatu sistem yang mengatur keuangan dalam bidang pendidikan yang telah diatur berdasarkan undang-undang, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, yang dilain sisi berperan dalam membantu meralisasikan program pemerintah dalam bidang

pendidikan untuk mencapai tujuan, seperti biasanya anggaran pendidikan dirancang dalam kurun waktu atau periode tertentu.

b. Definisi Operasional

Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui APBN dan alokasi anggaran pendidikan yang kemudian di transfer ke daerah. Data tersebut diperoleh dari Kemdikbud pada tahun 2015-2018.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data dan pengujian hipotesis penelitian. Dimana data yang telah didapat berfungsi sebagai penafisran data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan uji regresi data panel.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, yaitu penggabungan dari data silang tempat (*cross section*) dan silang waktu (*time series*). Dimana menurut Gujarati (2003) untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu.

Keunggulan menggunakan data panel menurut Hsiao (2003) dibandingkan dengan *time series* dan *cross section* adalah :

- 1) Data panel mampu menangkap heterogenitas dalam setiap individu.

- 2) Data panel mampu memberikan informasi yang lebih lengkap, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat kebebasan, dan lebih efisien.
- 3) Data panel lebih mampu melihat dinamika data.
- 4) Datapanel lebih bisa mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak mampu dideteksi oleh *cross section* dan *time series*.
- 5) Data panel mampu menguji model yang lebih rumit dibandingkan dengan data *cross section* dan *time serie*.
- 6) Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks.
- 7) Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu atau perusahaan karena unit data lebih banyak.

Persamaan regresi yang digunakan untuk melihat pengaruh Kemiskinan dan Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah adalah :

$$APS = \alpha_{it} + \beta_1 KMS_{it} + \beta_2 AGP_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi

APS : Angka Partisipasi Sekolah

KMS : Kemiskinan

AGP : Anggaran Pendidikan

e_{it} : *Error Term*

Persamaan regresi di atas selanjutnya ditransformasi menjadi bentuk logaritma. Transformasi data dengan dilogartmakan dapat menjadikan data baik parsial dalam uji t maupun keseluruhan dalam uji t menjadi valid (Hamdi, 2014).

$$\log APS = \alpha_{it} + \beta_1 \log KMS_{it} + \beta_2 \log AP_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi

\log : Bentuk transformasi data

e_{it} : *Error Term*

Mengacu pada model Regresi Data Panel pada persamaan, dalam penelitian ini terdapat tiga metode yang bisa digunakan untuk proses pengolahan data dengan menggunakan data panel, yaitu :

a. Model *Common Effect / Pooled Least Square*

Pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan data panel adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan dalam data berbentuk *pool*, sering disebut dengan *Pooled Least Square*. Kelemahan metode *pooled least square* ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi ini tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda pada kondisi objek tersebut pada waktu yang lain.

Model ini pada dasarnya mengabaikan struktur panel dari data, sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu atau dengan kata lain pengaruh spesifik dari masing-masing individu diabaikan atau dianggap tidak ada. Dengan demikian, akan dihasilkan sebuah persamaan regresi yang sama untuk setiap unit *cross section*. Sesuatu yang kurang realistis tentunya kurang dapat diterima. Karena itu model ini sangat jarang digunakan.

Berdasarkan asumsi struktur matriks varians-covarians residual, maka pada model *common effects*, terdapat 4 metode estimasi yang dapat digunakan yaitu:

- a) *Ordinary Least Square (OLS)*, jika struktur matriks varians-covarians residualnya diasumsikan bersifat homoskedatik dan tidak ada cross sectional correlation.
- b) *General Least Square (GLS)/ Weight Least Square (WLS): Cross Sectional Weight*, jika struktur matriks varians-covarians residual diasumsikan bersifat heterokedastik dan tidak ada cross sectional correlation.
- c) *Feasible Generalized Least Square (FGLS)/ Seemingly Uncorrelated Regression (SUR) atau Maximum Likelihood Estimator (MLE)*, jika struktur matriks varians-covarians, residual diasumsikan bersifat heterokedastik dan tidak ada cross sectional correlation.
- d) *Feasible Generalized Least Square (FGLS) dengan proses autogressive (AR)* pada error term-nya, jika struktur matriks varians-covarians residualnya diasumsikan bersifat heterokedastik dan ada korelasi antar waktu pada residualnya.

Persamaan model ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{it}^j + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

- Y_{it} : Variabel terikat individu ke-i pada waktu ke-t
 X_{it}^j : Variabel bebas ke-j individu ke-i pada waktu ke-t
i : Unit cross-section sebanyak N
j : Unit time series sebanyak T
 ε_{it} : Komponen error individu ke-i pada waktu ke-t
 α : Intercept

β_j : Parameter untuk variabel ke-j

b. Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Metode efek tetap ini dapat menunjukkan perbedaan antar objek meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Model ini dikenal dengan model regresi *Fixed Effect* (Efek Tetap). Efek tetap ini dimaksudkan adalah bahwa satu objek, memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*).

Keuntungan metode efek tetap ini adalah dapat membedakan efek individual dan efek waktu dan tidak perlu mengasumsikan bahwa komponen error tidak berkorelasi dengan variabel bebas yang mungkin sulit dipenuhi. Dan kelemahan metode efek tetap ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain. Persamaan model ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_j X_{it}^j + \sum_{i=2}^n \alpha_i D_i + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} : Variabel terikat individu ke-i pada waktu ke-t

X_{it}^j : Variabel bebas ke-j individu ke-i pada waktu ke-t

D_i : *Dummy* variabel

ε_{it} : Komponen error individu ke-i pada waktu ke-t

α : *Intercept*

β_j : Parameter untuk variabel ke-j

c. Model Efek Random (*Random Effect*)

Model ini perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan dengan error dari model. Terdapat dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan error yaitu (individu dan waktu), maka pada metode ini perlu diuraikan menjadi error dari komponen individu, error untuk komponen waktu dan error gabungan. Persamaan *random effect* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{it}^j + \varepsilon_{it}, \quad \varepsilon_{it} = u_i + V_t + W_{it}$$

Keterangan :

u_i : Komponen *error cross section*

V_t : Komponen *time series*

W_{it} : Komponen *error* gabungan

1. Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel

Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih metode atau pendekatan mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tahapan uji (*test*) yang dapat dijadikan alat dalam memilih regresi data panel (CE, FE, atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu *F test (Chow test)* dan *Hausman Test*.

a. Uji Chow

Uji *Chow* adalah pengujian untuk menentukan model pemilihan estimasi apakah model yang akan digunakan *common effect model* atau *fixed effect model* (Sofyan Yamin, 2011:200). Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model *common effect* lebih baik

H_1 : Model *fixed effect* lebih baik

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol tersebut adalah dengan menggunakan *chow* statistik F statistic yang dirumuskan sebagai berikut:

$$CHOW = \frac{(ESS1 - ESS2)N - 1}{(ESS2)/(NT - N - K)} - 1$$

Keterangan :

ESS1 : Residual Sum Square hasil perdukangan model *fixed effect*

ESS2 : Residual Sum Square hasil perdukangan model *pooled last square*

N : Jumlah Data Cross Section

T : Jumlah Data Time Series

K : Jumlah Variabel Penjelas

Statistik *Chow* test dapat dilihat dari *p-value Cross-Section* F lebih kecil dari alpha (0,05) maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesis nol, sehingga model yang digunakan adalah model *fixed effect*, dan berlaku sebaliknya.

b. Uji Hausman

Uji *Hausman* digunakan untuk membandingkan apakah *fixed effect model* atau *random effect model* yang lebih sesuai untuk estimasi dalam regresi data panel. Menurut Rinding dan Firdaus, (2009, p. 231). Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$$m = (\beta - b)(M_0 - M_1)^{-1}(\beta - b) \sim X^2(K)$$

Keterangan :

β : vektor untuk statistik variabel *fixed effect*,

b : vector statistic variabel *random effect*,

M0 : matrik kovarians untuk dugaan fixed effect model

M1 : matrik kovarians untuk dugaan random effect model.

H₀ : Model *random effect* lebih baik

H₁ : Model *fixed effect* lebih baik

Pada uji *hausman* dasar penolakan H₀ dibandingkan *cross section random*. Jika hasil pengujian *hausman test* lebih besar dari *cross section random*, maka H₀ ditolak, yang artinya model *fixed effect* lebih baik, dan sebaliknya. Kesimpulannya :

1. Jika *Hausmen test* menerima H₁ atau p-value < 0,05 maka metode yang kita pilih adalah *fixed effect*.
2. Jika *Hausmen test* menerima H₀ atau p-value > 0,05 maka metode yang kita pilih adalah *random effect*.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Menurut Bayyina, (2016: 613) Uji *Lagrange Multiplier* (LM) adalah pengujian untuk memilih model yang lebih baik antara *common effect model* atau *random effect model*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{[\sum_i^n =1] \sum_t^T =1eit}{[\sum_i^n =1] \sum_t^T =1eit^2} - 1 \right]^2$$

Keterangan :

n : Jumlah individu

T : Jumlah periode waktu

e : Residual metode Common Effect (OLS)

H₀ : Model *common effect* lebih baik

H₁ : Model *random effect* lebih baik

Jika nilai *probability* Breusch-Pagan kurang dari α maka H_0 ditolak yang berarti regresi data panel yang digunakan adalah model *random effect* dan sebaliknya.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan cara untuk mengetahui model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak terdapat heterokedastisitas dan multikolinieritas. Jika telah memenuhi asumsi klasik, berarti model regresi *Best Linier Unbias Estimator/BLUE*. Untuk itu sebelum pengujian linier berganda harus dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui sifat distribusi data penelitian. Uji normalitas dilakukan pada data sampel penelitian yang berfungsi untuk mengetahui apakah sampel yang diambil normal atau tidak dengan menguji sebaran data yang dianalisis. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujiannya menggunakan alat statistic uji *Jarque-Bera* (Winarno, 2011).

$$JB = \frac{N - k}{6} + \left[S^2 + \frac{(K - 3)^2}{4} \right]$$

Keterangan:

JB = *Jarque- Bera*

S = *Skewness* (kemencengan)

K = *Kurtosis* (keruncingan)

Kriteria pengambilan keputusan dengan alat statistik uji *Jarque-Bera* (JB) dengan X^2 tabel, yaitu:

- 1) Jika nilai $JB \geq X^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi tidak normal
- 2) Jika nilai $JB \leq X^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi normal

Begitupun kriteria pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitasnya, yaitu

- a. Jika signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal
- b. Jika signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana antara dua variabel independen atau lebih padamodel regresi terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinieritas.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dengan melihat nilai *Tolerance Value*. *Tolerance Value* adalah suatu jumlah yang menunjukkan bahwa variabel bebas tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya dalam suatu nilai yang menunjukkan tidak adanya multikolinieritas dalam persamaan regresi. Batas dari *tolerance Value* adalah 10, jika *tolerance Value* > 10 maka terjadi multikolinieritas dalam model regresi, sedangkan jika *tolerance Value* < 10 maka

tidak ada multikolinearitas dalam model regresi (Sarwoko, 2005). Uji VIF dengan hipotesis :

$VIF > 10$, artinya terjadi multikolinearitas.

$VIF < 10$, artinya tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu penyimpangan asumsi OLS dalam bentuk varians gangguan estimasi yang dihasilkan oleh estimasi OLS tidak bernilai konstan untuk semua pengamatan. Dengan kata lain uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan Hipotesis :

H_0 : Varians error bersifat homoskedastisitas, bilai nilai Prob. Chi Square $> \alpha$

H_1 : Varians error bersifat heteroskedastisitas, bilai nilai Prob. Chi Square $< \alpha$

Jika hasil *p-value* Prob. Chi Square > 0.05 maka H_0 diterima, artinya varians error bersifat homoskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual lainnya. Dalam uji ini autokorelasi dapat terjadi jika tidak ada korelasi antar *error term* pada periode pengamatan-pengamatan yang berbeda diperlonggar dalam sebuah persamaan yang telah terspesifikasi dengan benar. Asumsi itu sebagai berikut :

$$E(r_{ui}u_j) = 0 \text{ atau } Cov(u_iu_j) = 0 \quad (i \neq j)$$

Apabila nilai yang diharapkan dari koefisien korelasi sederhana antara setiap dua pengamatan error term adalah tidak sama dengan 0, maka *error term* tersebut dikatakan tidak memiliki autokorelasi. Autokorelasi dapat berbentuk autokorelasi positif dan autokorelasi negative. Nilai positif dapat menunjukkan bahwa *error term* cenderung memiliki tanda atau arah yang sama dari satu periode waktu ke waktu berikutnya, sedangkan tanda negative menunjukkan *error term* memiliki suatu kecenderungan berubah-ubah tanda dari negatif ke positif dan seterusnya selang berganti tanda pada pengamatan-pengamatan berikutnya.

Identifikasi autokorelasi ini dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson dan uji Breusch-Godfrey. Namun dalam penelitian ini, deteksi autokorelasi ini menggunakan uji Breusch-Godfrey, dengan hipotesis :

H_0 : Tidak terdapat autokorelasi, bilai nilai Prob. Chi Square $> \alpha$.

H_1 : Terdapat autokorelasi, bilai nilai Prob. Chi Square $< \alpha$.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis tentang koefisien-koefisien slope regresi secara individual. Dengan uji ini maka dapat mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan beranggapan variabel independen lain tetap/konstan. Dengan tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 5\%$, Langkah-langkah uji t dapat dinyatakan sebagai berikut:

1) Menentukan Hipotesis

H_0 : Secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

H_a : Secara parsial ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

2) Menentukan tingkat signifikan

Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 ($\alpha = 5\%$), $df = n = k - 1$

3) Menentukan t hitung

$$t_{ht} = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{(1 - r^2)}}$$

Keterangan:

r = Koefisiensi korelasi variable

n = jumlah ukuran sampel

4) Menentukan t tabel

Nilai t tabel = $t_{\alpha ; N - K}$

Keterangan :

α = derajat signifikansi

N = jumlah sampel (banyaknya observasi)

K = banyaknya parameter/variabel

5) Kriteria Pengujian

H_0 diterima : $t_{hitung} < t_{tabel}$

H_0 ditolak : $t_{hitung} > t_{tabel}$

4. Uji F

Uji F adalah koefisien regresi secara bersama-sama, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak signifikan dalam persamaan regresi. Dengan taraf signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$. Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :

$$F\text{-hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan:

n = Jumlah data

k = Jumlah variabel independen

R^2 = Koefisien determinasi

Tahap-tahap untuk melakukan Uji F, adalah:

1) Menentukan hipotesisnya

a) $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

Berarti, semua variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b) $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$

Berarti, semua variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2) Melakukan perhitungan nilai f sebagai berikut:

a) Nilai F tabel = $F_{\alpha; K-1/N-K}$

Keterangan : α = derajat signifikansi

N = jumlah sampel (banyaknya observasi)

K = banyaknya parameter/variabel

3) Kriteria pengambilan keputusan, yaitu:

- a) Apabila nilai F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.
- b) Apabila nilai F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

5. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Kualitas hasil estimasi yang dapat digambarkan ke dalam suatu garis diregresi dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu kesalahan standar, varian dan koefisien determinasi. Kesalahan standar dan varian memberikan indikator parameter koefisien regresi dalam memberikan besaran variabel terikat.

Selain itu koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu angka koefisien yang menunjukkan besarnya variasi suatu variabel terhadap variabel lainnya

yang dinyatakan dalam presentase. Uji ini bertujuan untuk mengetahui besarnya presentase terikat yang disebabkan oleh variabel bebas.

Secara garis besar koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel-variabel bebas. Nilai Koefisien determinasi adalah hanya berkisar antara 0-1 ($0 < R < 1$) yang dijelaskan dalam ukuran presentase.

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas menjelaskan

$$R^2 = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Regresi}}{\text{Jumlah kuadrat total terkoreksi}}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil analisis data yang menjadi tujuan penelitian, Pembahasan hasil penelitian terdiri dari deskripsi data dan hasil estimasi data panel yang menganalisis pengaruh kemiskinan dan anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia.

A. Deskripsi Data

Data dalam penelitian ini berbentuk data sekunder yang menggambarkan populasi sampel penelitian dari masing-masing variabel dependen dan variabel independen. Data tersebut dipergunakan untuk mengukur variabel penelitian diantaranya angka partisipasi sekolah, kemiskinan, dan anggaran pendidikan. Sampel penelitian ini menggunakan *cross-section* dari 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan *time series*nya terdiri dari empat tahun yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Pengambilan 34 provinsi sebagai sampel penelitian berdasarkan atas, permasalahan yang tersebar secara umum. Selain itu pertimbangan lainnya terkait dengan ketersediaan data pada semua variabel dalam penelitian yang dapat memenuhi *time series* penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis panel regresi berganda. Data pada semua variabel ini dilakukan uji persyaratan dan uji asumsi klasik serta

menggunakan prom *Eviews 8* dalam mengolah data. Deskripsi data hasil penelitian ini menjelaskan tentang gambaran hasil pengolahan data secara umum.

Tabel IV.1
Statistik Deskriptif

No.		APS	KMS	AGP
1	MEAN	1.865806	0.989733	2.694128
2	MEDIAN	1.862160	0.978860	2.667737
3	MAX	1.946403	1.453318	4.174028
4	MIN	1.792111	0.550228	1.615740
5	Std.Deviasi	0.035075	0.225496	0.565014

Sumber : diolah penulis, 2019

Berdasarkan tabel IV.1 menunjukkan deskripsi data secara umum, yang mana data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kemdikbud. Dengan variabel yang digunakan yaitu angka partisipasi sekolah (APS), kemsikinan (KMS), dan angrgan pendidikan (AGP).

1. Angka Prtisipasi Sekolah

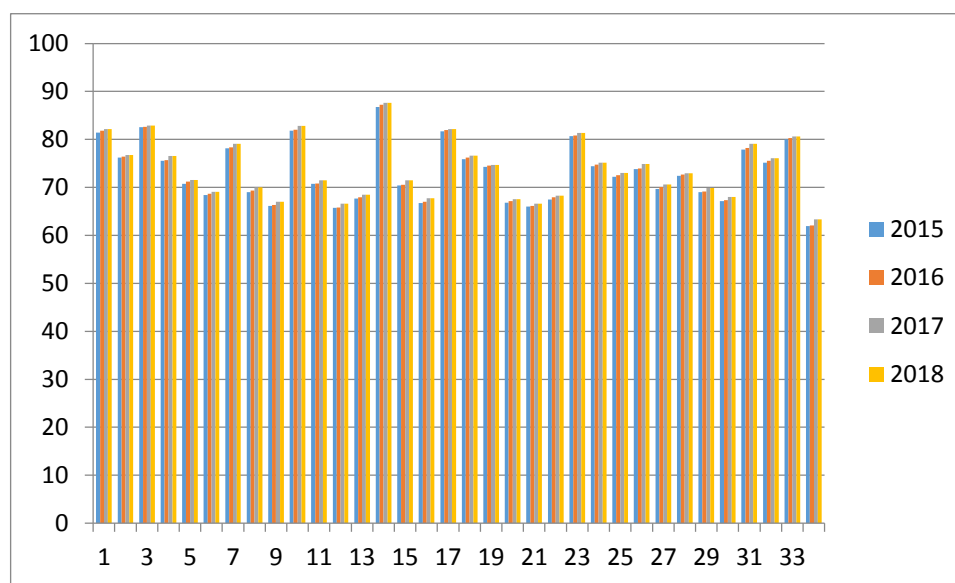
Tabel IV.2
Statistik Deskriptif Angka Partisipasi Sekolah

No.		APS
1	MEAN	1.865806
2	MEDIAN	1.862160
3	MAX	1.946403
4	MIN	1.792111
5	Std.Deviasi	0.035075

Sumber : diolah penulis, 2019

Angka partisipasi sekolah merupakan variabel terikat (*dependent*) menggambarkan proporsi kelompok usia sekolah yang sedang besekolah yang terserap pada lembaga pendidikan yang berada di seluruh provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2015-2018. Dari table di atas menunjukkan bahwa rata-rata

angka partisipasi sekolah sebesar 1,865, nilai tertinggi yaitu 1,946, dan memiliki nilai terendah 1,792. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan gambaran angka partisipasi sekolah seluruh provinsi dalam kurun waktu empat tahun terakhir.



Sumber : diolah penulis, 2019

Gambar IV. 1
Presentase Angka Pasrtisipasi Sekolah dalam Persen di Indonesia Tahun 2015-2018

Perkembangan presentase angka partisipasi sekolah setiap tahunnya memiliki kenaikan, namun masih saja menjadi perhatian dengan tingginya angka putus sekolah yang besar presentasinya, mengingat semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil presentasinya. Berdasarkan gambar IV.1 data dari seluruh provinsi yang memiliki presentase terkecil adalah provinsi papua dengan nilai 61,96 persen, pada provinsi papua, sedangkan terbesar pada provinsi Di Yogyakarta dengan presentase sebesar 88,39 persen.

Rendahnya angka partisipasi sekolah yang terjadi pada beberapa provinsi besar disebabkan, hambatan faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah yang mempengaruhi keputusan dalam melanjutkan pendidikan. Sehingga

terjadi tinggi dan rendahnya angka partisipasi sekolah di beberapa wilayah Indonesia.

2. Kemiskinan

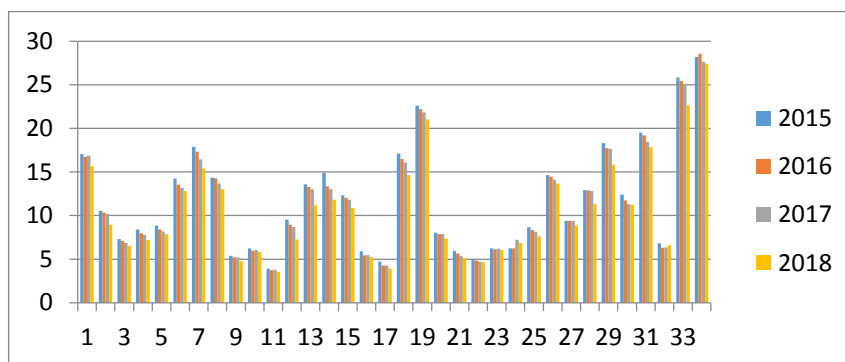
Tabel IV.3
Statistik Deskriptif Kemiskinan

No.		KMS
1	MEAN	0.989733
2	MEDIAN	0.978860
3	MAX	1.453318
4	MIN	0.550228
5	Std.Deviasi	0.225496

Sumber : diolah penulis, 2019

Kemiskinan merupakan variabel bebas (*independent*) yang menggambarkan sekelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tidak dapat memenuhi kebutuhan materil maupun nonmateril. Kemiskinan menunjukkan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, dari seluruh provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2018.

Berdasarkan table IV.3 di atas menunjukkan rata-rata kemiskinan di Indonesia memiliki nilai 0,989 dan terbesar memiliki nilai 1,453 dan terkecil memiliki nilai 0,552. Berikut merupakan gambar perkembangan gerak kemiskinan yang menurun setiap tahunnya, dalam kurun waktu empat tahun terakhir.



Sumber : diolah penulis, 2019

Gambar IV. 2

Presentase kemiskinan dalam Persen di Indonesia Tahun 2015-2018

Penurunan presentase kemiskinan setiap tahunnya terus terjadi, meskipun penurunan tidak dapat diartikan baik, seperti pada gambar di atas dapat diketahui persentase dengan jumlah kelompok masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan adalah provinsi papua, dengan nilai 28,4 persen dan DKI Jakarta dengan tingkat kemiskinan terendah dengan nilai 3,55 persen. Kecilnya angka kemiskinan di DKI Jakarta, karena berbagai hal yang mempengaruhinya, dan juga wilayah yang berada di daerah pusat pemerintahan lain halnya dengan provinsi papua yang jauh dari pusat pemerintahan.

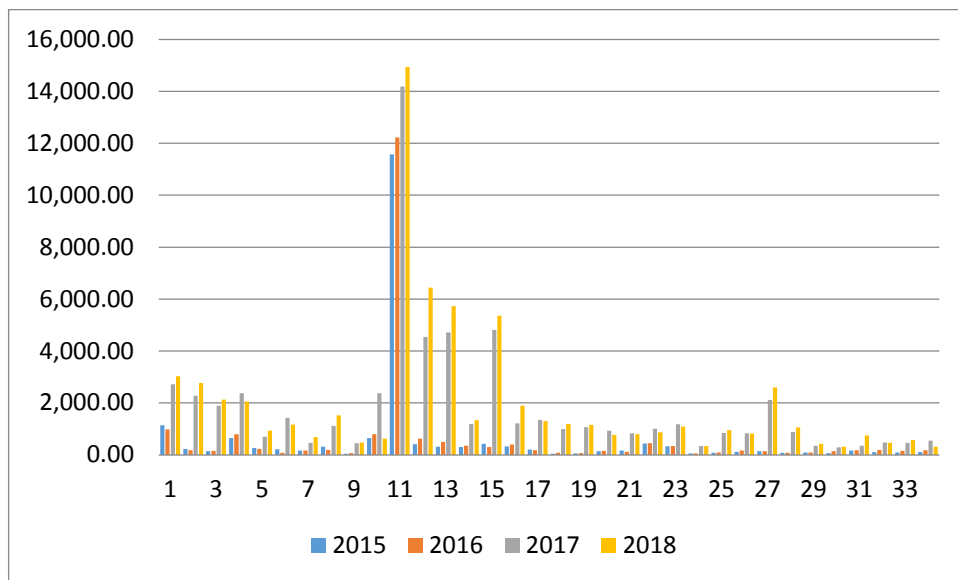
3. Anggaran Pendidikan

Tabel IV.4
Statistik Deskriptif Anggaran Pendidikan

No.		AGP
1	MEAN	2.694128
2	MEDIAN	2.667737
3	MAX	4.174028
4	MIN	1.615740
5	Std.Deviasi	0.565014

Sumber : diolah penulis, 2019

Anggaran pendidikan merupakan variabel bebas (*independent*) yang menggambarkan besarnya anggaran yang pemerintah pusat berikan kepada otonomi daerah. Rata-rata anggaran pendidikan memiliki nilai sebesar 2,694, serta memiliki nilai terbesar yaitu 4,174, dan memiliki nilai terendah sebesar 1,615. Berikut gambaran persebaran anggaran pendidikan pada seluruh provinsi di Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir.



Sumber : diolah penulis, 2019

Gambar IV. 3
Anggaran Pendidikan dalam Rupiah di Indonesia Tahun 2015-2018

Gambar di atas menggambarkan bahwa persebaran anggaran pendidikan tidak terlalu merata, seperti dapat di lihat di atas, bahwa yang memiliki anggaran terbesar pada provinsi DKI Jakarta, dan provinsi dengan anggaran pendidikan terkecil adalah kep. Bangka Belitung. Anggaran pendidikan belum sepenuhnya terdistribusi dengan baik.

B. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat penelitian analisis regresi berganda data panel dengan menggunakan *Eviews 8*. Pemilihan program ini ksrena kemudahan dalam melakukan analisis regresi data yang berupa data *cross-section*, *time series*, dan panel. Sebelum menganalisis regresi, peneliti melaukan uji spesifikasi model untuk menentukan model analisis yang baik. Uji ini dilakukan dengan melakukan uji *Chow Test*, *Hausman Test* dan *LM Test*.

1. Uji Spesifikasi Model

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews 8*, digunakan program *Eviews* ini sebagai bentuk dalam menentukan model terbaik dengan uji *Chow* dan *Hausmen*.

a. *Chow Test*

Chow Test dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan dalam memilih model antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Dalam pengujian ini hasil nialai probabilitas *Cross-section F* $> 0,05$, maka model yang digunakan yaitu *Common*, berlaku sebaliknya, apabila nilai probabilitas *Cross-section F* $< 0,05$, maka model *fixed Effect* yang digunakan. Hasil pengolahan Uji *Chow* sebagai berikut:

Tabel IV.5
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1010.421927	(33,100)	0.0000
Cross-section Chi-square	790.493908	33	0.0000

Sumber : diolah penulis, 2019

Berdasarkan Tabel IV.5 hasil *Chow Test* di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai *Prob. Cross-section F* sebesar 0.0000. Dengan tingkat signifikan 0,05, maka H_0 penggunaan model *Common Effect* ditolak dan H_1 penggunaan model *Fixed Effect* diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih baik dari *Common Effect*.

b. *Hausman Test*

Hausman Test adalah pengujian yang digunakan untuk memilih antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Hasil pengujian Hausman Test sebagai berikut:

Tabel IV.6
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.277691	2	0.3202

Sumber: data sekunder diolah Tahun 2019

Berdasarkan Uji Hausman, menunjukkan bahwa nilai *Prob. Cross-section F* sebesar 0.3202. Tingkat signifikan 0,05, maka H_0 penggunaan model *Random Effect* diterima dan H_1 penggunaan model *Fixed Effect* ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model *Random Effect* lebih baik dari *Fixed Effect*.

c. *Langrangge Multiplier (LM) Test*

Uji LM dilakukan untuk membandingkan antara model *Common Effect* dan *Random Effect*. Perhitungan uji LM sebagai berikut:

Tabel IV. 7
Hasil Uji LM

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	201.9814	1.929066	203.9105
	(0.0000)	(0.1649)	(0.0000)
Honda	14.21202	-1.388908	9.067307
	(0.0000)	(0.9176)	(0.0000)
King-Wu	14.21202	-1.388908	2.772877
	(0.0000)	(0.9176)	(0.0028)
GHM	--	--	201.9814
	--	--	(0.0000)

Sumber : diolah penulis, 2019

Berdasarkan Tabel IV.7 Hasil Uji LM, menunjukkan bahwa nilai *Prob.* LM hitung sebesar 0.0000. Dengan tingkat signifikan 0,05, maka penggunaan model *Random Effect* diterima dan H_0 penggunaan model *Common Effect* ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model *Random Effect* lebih baik dari *Common Effect*.

Setelah melakukan uji *Chow*, *Hausman* dan LM dengan hasil yang menunjukkan bahwa model *Random Effect* dan lebih baik digunakan dibandingkan *Fixed* dan *Common Effect*. Kemudian penelitian ini menggunakan model *Random Effect*.

2. Uji Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas

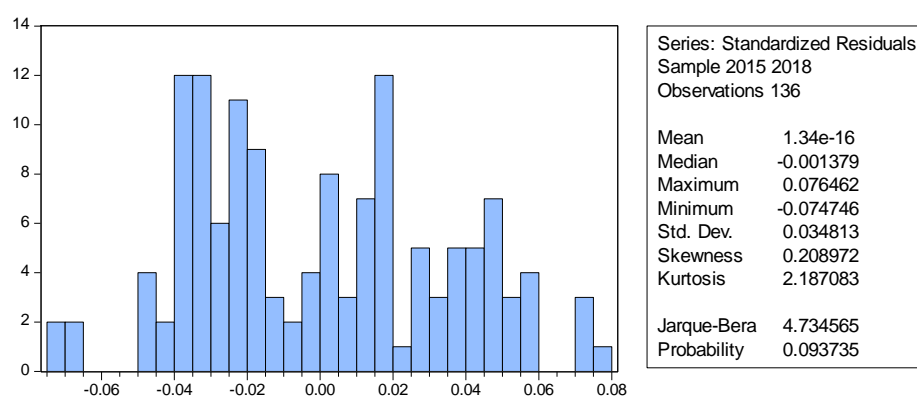
Uji Normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Normalitas dapat

terdeteksi, salah satunya dengan menggunakan uji statistic normal probability.

Kriteria pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability, yakni :

Jika probability $> 0,05$ maka H_0 ditolak berarti data terdistribusi dengan normal.

Jika probability $< 0,05$ maka H_0 diterima berarti data tidak terdistribusi dengan normal.



Sumber : diolah penulis, 2019

Gambar IV. 4
Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui sifat distribusi data penelitian.

Dengan melihat Tabel IV. 5, maka dapat diketahui nilai probabilitynya sebesar 0,093735 yang apabila dibandingkan dengan tingkat signifikan 5%. Oleh karena nilai probabilitasnya ($0,093735$) $> 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati anatar variabel independen dalam model regresi. Cara untuk mengetahui ada atau tidak gejala multikolonieritas antara lain dengan

melihat nilai variance inflation factor (VIF), apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel IV. 8
Uji Multikolonieritas

Variance Inflation Factors			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	0.000537	59.41633	NA
KMS	0.000194	22.09288	1.082600
AGP	3.09E-05	25.87918	1.082600

Sumber : diolah penulis, 2019

Deteksi multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antarvariabel bebas. Berdasarkan Tabel IV. 6, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi nilai variabel AGP sebesar 1.082600, dan KMS sebesar 1.082600. Dengan mempertimbangkan *Tolerance Value* yang mana merupakan suatu jumlah yang menunjukkan bahwa variabel bebas tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya dalam persamaan regresi. Batas nilai *tolerance value* pada penelitian ini sebesar 10, oleh karena nilai *tolerance value* antarvariabel < 10 , maka tidak ada multikolonieritas dalam model regresi.

c. Uji Heterokedasitas

Heterokedasitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik memiliki syarat tidak adanya masalah heterokedasitas.

Tabel IV. 9
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.621733	Prob. F(2,133)	0.5386
Obs*R-squared	1.259737	Prob. Chi-Square(2)	0.5327
Scaled explained SS	0.715083	Prob. Chi-Square(2)	0.6994

Sumber : diolah penulis, 2019

Berdasarkan Tabel IV. 9, Uji White menunjukkan bahwa Obs*R-Squared adalah sebesar 0,5327 dan nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0,5327. Dengan kata lain nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. H_0 ditolak maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas. Oleh karena itu data bersifat homoskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel IV. 10
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	2.790943	Prob. F(2,129)	0.0651
Obs*R-squared	5.599227	Prob. Chi-Square(2)	0.0608

Sumber : diolah penulis, 2019

Autokorelasi (*Autocorrelation*) adalah hubungan antara residual satu observasi dengan nilai residual observasi lainnya. Berdasarkan uji autokorelasi dengan metode Breusch-Godfrey menunjukkan bahwa nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0,0651. Nilai tersebut lebih besar dari 5%, maka mengindikasikan bahwa data tidak adanya autokorelasi.

C. Persamaan Regresi

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi panel. Variabel-variabel penelitian antara lain angka partisipasi sekolah,

kemiskinan, dan anggaran pendidikan. Sebagaimana pada deskripsi sebelumnya telah di uji *Chow*, *Hausman* dan *LM* yang telah dilakukan, ditentukan bahwa model yang digunakan penelitian ini ialah model *Random effect*.

Tabel IV. 11
Hasil Model *Random Effect*

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 34				
Total panel (balanced) observations: 136				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.881250	0.012927	145.5279	0.0000
LOG(KMS)	-0.028739	0.010397	-2.764218	0.0065
LOG(AGP)	0.004825	0.000586	8.238511	0.0000

Sumber : diolah penulis, 2019

Persamaan regresi yang terdapat model *Random effect* sebagai berikut:

$$\log(\text{APS}) = 1,881250 - 0,028739\log(\text{KMS}) + 0,004825\log(\text{AGP})$$

Keterangan persamaan di atas adalah sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 1,88 artinya jika X1 (KMS), X2 (AGP), nilainya adalah 0, maka besarnya Y (APS) nilainya sebesar 1,88.
2. Koefesien regresi variable X1 (KMS) sebesar -0,02, artinya setiap peningkatan X1 (KMS) sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan Y (APS) sebesar -0,02 satuan, dengan asumsi variabel indepden lainnya tetap.
- 3.

4. Koefisien regresi variable X2(AGP) sebesar 0,04 artinya setiap peningkatan X2 (KMS) 1 satuan, maka akan meningkatkan Y (APS) sebesar 0,04 satuan, dengan asumsi variable independen lainnya tetap.

5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan uji t, uji f, dan koefisien determinasi(R^2). Uji ini menggunakan *Eviews 8*, dan didapat hasil olah data sebagai berikut:

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian uji t dilakukan dengan menggunakan kriteria berdasarkan perbandingan nilai t-statistik (t_{hitung}) dari masing-masing koefisien variable independen terhadap nilai t_{tabel} dan juga berdasarkan probabilitas. Hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh X1, X2 secara parsial terhadap Y

H_a : Terdapat pengaruh X1, X2 secara parsial terhadap Y

1.) Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Tabel IV.12
Hasil Uji t Kemiskinan

Variabel t	t-Statistik	Prob.
Log(KMS)	-2,76	0.0065

Sumber : diolah penulis, 2019

Hipotesis pertama pada penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah. Berdasarkan hasil uji

t menunjukkan hasil pengujian parsial antara variable kemiskinan dan angka partisipasi sekolah menghasilkan nilai t_{hitung} -2,76. Nilai t_{hitung} negatif yang berarti kemiskinan memiliki hubungan negatif dengan angka partisipasi sekolah. Nilai t tabel dapat dilihat pada tabel t statistik pada $df = n-k-1$ atau $136-2-1 = 133$ dengan signifikansi 0,05 dan uji 2 sisi diperoleh hasil t tabel = -1,65 yang berarti nilai t_{hitung} -2,76 > nilai t_{tabel} -1,65.

Pertimbangan lain juga dengan melihat nilai Prob. yang ada pada tabel sebesar 0,0065. Apabila nilai probalitas dibandingkan dengan tingkat signifikan sebesar 5%, maka $prob < 0,05$, yang bahwa secara parsial signifikan berpengaruh antara variabel independen dengan dependen.

2.) Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Tabel IV. 13
Hasil Uji t Anggaran Pendidikan

Variabel t	t-Statistik	Prob.
Log(AGP)	8,23	0.0000

Sumber : diolah penulis, 2019

Hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan hasil pengujian parsial antara variable anggaran pendidikan dan angka partisipasi sekolah menghasilkan nilai t_{hitung} 8,23. Nilai t_{tabel} dapat dilihat pada tabel t statistik pada $df = n-k-1$ atau $136-2-1 = 133$ dengan signifikansi 0,05 dan uji 2 sisi diperoleh hasil t tabel = 1,65 yang berarti nilai t_{hitung} 8,23 > nilai t

tabel 1,65. Nilai t_{hitung} positif yang berarti anggaran pendidikan memiliki hubungan positif dengan angka partisipasi sekolah.

Pertimbangan lain juga dengan melihat nilai Prob. yang ada pada tabel sebesar 0,0000. Apabila nilai probabilitas dibandingkan dengan tingkat signifikan sebesar 5%, maka $prob < 0,05$, yang bahwa secara parsial signifikan berpengaruh antara variabel independen dengan dependen.

3.) Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variable independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen.

Hipotesis :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y.

H_a : Terdapat pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y.

Kriteria pengambilan keputusan :

H_0 diterima bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ (Tidak terdapat pengaruh antar variable independen dengan variable dependen).

H_a ditolak bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ (Terdapat pengaruh antar variable independen dengan variable dependen).

Tabel IV. 14**Hasil Uji F**

F-Statistik	Prob.
83,76	0.0000

Sumber : diolah penulis, 2019

Nilai F table menunjukkan bahwa kemiskinan dan anggaran pendidikan bersama-sama berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan hasil pengujian simultan antara variabel menghasilkan nilai F 83,76 dengan probabilitas sebesar 0,0000. yang berarti variabel kemiskinan dan anggaran pendidikan secara bersama-sama atau serempak berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah.

Nilai F_{tabel} dapat dilihat pada tabel F statistic pada df1. Dengan Signifikansi 0,05 diperoleh hasil $F_{\text{tabel}} = 3,06$. Variabel kemiskinan, anggaran pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Hal ini karena $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($83,76 > 3,06$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

c. Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Analisis determinasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variable X memberikan kontribusi terhadap variable Y. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui kontribusi pengaruh variable independen secara bersama-sama terhadap variable dependen.

Koefisien dterminasi R^2 merupakan suatu angka koefisien yang menunjukkan besarnya variasi satu variabel terhadap variabel lainnya yang

dinyatakan dalam presentase. Hasil koefisien determinasi pada persamaan regresi penelitian ini sebagai berikut :

Tabel IV.15

Koefisien Determinasi

R^2	0,557443
-------	----------

Sumber: data sekunder diolah tahun 2019

Berdasarkan Tabel IV.15, menunjukkan hasil analisis koefisien korelasi yang nilainya diperoleh sebesar 0,557443 atau sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kontribusi yang diberikan variabel independen sudah baik untuk variabel dependen.

Persamaan regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu kemiskinan dan anggaran pendidikan menjelaskan keragaman nilai variabel angka partisipasi sekolah sebesar 55% dan sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melakukan tahapan analisis regresi data panel, uji normalitas dan asumsi klasik dari tahun 2015 sampai dengan 2018, data telah lolos semua uji. Artinya data dapat digunakan untuk menjadi estimator dari masing-masing variabel penelitian antara lain angka partisipasi sekolah, kemiskinan, dan anggaran pendidikan. Dalam pengujian model persamaan regresi ini menggunakan model *Random Effect*.

Tabel IV.16
Nilai Koefisien Antar Variabel

Variabel	Hubungan yang Ditemukan	Signifikansi
Coefficient	Positif (+)	Signifikan
Log(KMS)	Negatif (-)	Signifikan
Log(AGP)	Positif (+)	Signifikan

Sumber : diolah penulis, 2019

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada model Random Effect diperoleh hasil sebagai berikut :

1. **Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah**

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan hasil pengujian parsial antara variable kemiskinan dan angka partisipasi sekolah menghasilkan nilai t -2,76 dengan probabilitas sebesar 0,0065 lebih kecil dari 0,05. Nilai t_{hitung} negatif yang berarti kemiskinan memiliki hubungan negatif dengan angka partisipasi sekolah dan berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan data yang sudah diuji, dan melalui kualifikasi, bahwa kemiskinan dapat berpengaruh negatif terhadap angka partisipasi sekolah. Seperti yang diungkapkan Kumalasari (2011) kemiskinan adalah suatu keadaan terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan

pekerjaan. Masyarakat yang hidup dibawah kemiskinan tidak dapat hidup dibawah garis kemiskinan, karena tidak mampu memnuhi kebutuhan materil maupun nonmateril. Seperti salah satunya adalah pendidikan.

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah dan di luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Tinggi rendahnya angka partisipasi sekolah masyarakat tidak terlepas dari latar belakang ekonomi keluarga.

Latar belakang ekonomi menjadi salah satu faktor seorang anak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Tinggi rendahnya pendapatan suatu keluarga, mencerminkan apakah dapat memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti makanan, minuman. Sealian itu ada kesehatan, juga pendidikan. Jika sekelompok keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka dapat diakatkan miskin. Kemiskinan menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak banyak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Partisipasi sekolah yang dapat dipengaruhi oleh sisi permintaan, diantaranya kesejahteraan keluarga seperti kemiskinan. Seperti yang disampaikan, Mulfrod (2008) menunjukkan bahwa kemiskinan di seluruh dunia memiliki hubungan terhadap pendidikan.

Seperti yang dinyatakan Mulfrod tinggi rendahnya tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap dunia pendidikan. Kemajuan suatu daerah dapat

dilihat dari tingkat pendidikannya melalui seberapa besar angka partisipasi sekolah. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam keberlangsungan dunia pendidikan, serta dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Peneitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah lalu, seperti yang diteliti oleh G. M. Arif, Najam Us Saqib, Dan G. M. Zahid, 2015 DOI: 10.30541/v38i4Ipp.979-992 tentang “*Poverty, Gender, and Primary School Enrolment in Pakistan*” yang menemukan bahwa kemiskinan memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pendaftaran sekolah dasar. Dalam penelitiannya tersebut bahwa penurunan kemiskinan dapat mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah, dan variabel lainnya adalah gender yang masih mempengaruhi bahwa sekat pendidikan terhadap gender masih terjadi di paksitan.

Seperti saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar kemiskinan terus ditekan yang dilansir dari Kompas.com (2018) Tiga faktor yang membuat angka kemiskinan turun di 2018 dengan salah satunya bantuan sosial dari pemerintah turun tepat waktu dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Non Tunai (BTN), Beras Sejahtra (Rastra). Pemerintah sedang mengupayakan bagaimana kemiskinan dapat ditekan agar dapat mendukung semua aspek kehidupan.

Selain itu penelitian dari Mihaela Mihai, Emilia, dan Daniela Manea, (2015) juga berpendapat yang sejalan dalam penelitiannya yang berjudul "Education and Poverty" *Procedia Economics and Finance* 32 855 – 860 , doi: 10.1016/S2212-5671(15)01532-4. Terdapat korelasi tingkat kesejahteraan terhadap pendidikan yang mana dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat meningkatkan pendidikan. Penelitian lain juga menemukan hasil yang mendukung bahwa kemiskinan mempengaruhi angka partisipasi sekolah. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dapat terlepas dari pendidikan, apabila angka kemiskinan buruk maka juga dapat mempengaruhi kesejahteraan dalam pendidikan.

Hasil penelitian yang sejalan dai Khairunnisa, Sri Hartoyo, dan Lukytawati Anggraeni, yang meneliti tentang "Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat Determinant of Junior Secondary School Enrollment Rate in West Java" *Vol. 15 No. 1 Juli 2014: 91-112 p-ISSN 1411-5212; e-ISSN 2406-9280*. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah. Maka hasil uji di atas dapat dikatakan kemiskinan mempengaruhi angka partisipasi sekolah secara parsial. Dalam jurnalnya peneliti mengungkapkan faktor-faktor apasajakah yang dapat mempengaruhi angka partisipasi sekolah diantaranya adalah kemiskinan, tingkat pendidikan orang tua.

2. Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan hasil pengujian parsial antara variabel anggaran pendidikan dan

angka partisipasi sekolah menghasilkan nilai t 8,23 dengan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung positif yang berarti anggaran pendidikan memiliki hubungan positif dengan angka partisipasi sekolah.

Berdasarkan hasil uji t di atas pemebrian anggaran pendidikan memiliki pengaruh bersifat positif. Program pemerintah dapat didukung dengan anggaran pendidikan untuk meningkatkan jumlah partisipasi sekolah yang tentunya membenatu dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Seperti yang dinyatakan Supriadi (2010) bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyediann pendidikan.

Dengan adanya biaya yang mendukung pendidikan dapat membantu meningkatkan angka partisipasi sekolah, sama halnya yang dinyatakan Faguet dan Sanchez (2006) jumlah belanja pemerintah bidang pendidikan dengan angka partisipasi sekolah, yang mengindikasikan bahwa semakin besar belanja daerah yang di keluarkan oleh pemerintah pada bidang pendidikan maka akan semakin besar juga tingkat partisipasi sekolah pada daerah tersebut.

Meningkatnya anggaran pendidikan dapat dikatakan baik jika mendukung angka partisipasi sekolah, seperti program pememritah denagan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang salah satunya adalah sebagai upaya meningkatkan partisipasisekolah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawuli Gaddah a, Alistair Munro b, dan Peter Quartey, tentang " *Education subsidy and school enrollments in rural Ghana*" *International Journal of Educational Development*

46 (2016) 143–152//dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.11.001 0738-0593 dalam penelitiannya yang menyatakan terdistribusinya tunjangan pendidikan dapat mendukung partisipasi sekolah. Pemberian tunjangan pendidikan yang terdistribusi secara merata dapat mendukung kemajuan dalam pendidikan. Dengan menggunakan analisis manfaat, dimana menilai dampak yang diberikan pengeluaran oleh pemerintah.

Selain itu ada Jane Arnold Lincove, 2012 dengan judul “The influence of price on school enrollment under Uganda's policy of free primary” *LBJ School of Public Affairs, 3,240 Sid Richardson Hall, 2315 Red River, Austin, TX 78713* dx.doi.org/10.1016. Menyatakan bahwa Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada peluang untuk memperluas pendidikan melalui transfer tunai dan kebijakan subsidi yang ditargetkan. Dalam penggunaan metode survei dalam penelitiannya mendukung agar pendidikan dapat merata dengan pemberian transfer tunai, kebijakannya adalah dengan survei bahwa yang ditargetkan pemerintah dalam memberikan transfer tunai tepat sasaran.

3. Kemiskinan dan Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan anggaran pendidikan bersama-sama berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah. Berdasarkan hasil uji f menunjukkan hasil pengujian simultan antara variabel kemiskinan dan variabel anggaran pendidikan dan angka partisipasi sekolah menghasilkan nilai F 83,76 dengan probabilitas sebesar 0,0000. yang berarti

variabel kemiskinan dan anggaran pendidikan secara bersama-sama atau serempak berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah.

Perhitungan koefisien determinasi (R^2) untuk menentukan besarnya dependen disebabkan oleh variabel bebas. Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai koefisien determinasinya sebesar 0,557443 yang artinya variabel kemiskinan dan anggaran pendidikan mampu mempengaruhi angka partisipasi sekolah sebesar 55%. Sisanya 45% angka partisipasi sekolah dipengaruhi oleh faktor penentu lainnya seperti dari ruang lingkup sosial dan lingkungan.

Angka partisipasi sekolah dapat dipengaruhi oleh kemiskinan dan anggaran pendidikan secara simultan. Maka tidak dapat dipungkiri kedua variabel bebas tersebut memang memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan, seperti yang diungkapkan oleh Arze del Granado (2007) menyatakan bahwa yang mempengaruhi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi adalah biaya pendidikan. Pendidikan yang tinggi memerlukan biaya yang lebih tinggi pula, sehingga masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, untuk membiayai sekolah.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah dalam pendidikan dapat dipengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan dan anggaran pendidikan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi angka partisipasi sekolah, karena semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi biaya yang dibutuhkan dan mempengaruhi masyarakat miskin yang tidak dapat memuhi kebutuhannya, salah satuan

pendidikan. Dalam hal ini maka kemiskinan, biaya tidak dapat terlepas dari pendidikan.

D. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terjadi beberapa keterbatasan yaitu :

1. Angka partisipasi sekolah merupakan masalah pendidikan yang tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh kemiskinan dan anggaran pendidikan saja, terdapat faktor-faktor yang lain yang mempengaruhinya.
2. Keterbatasan pada sumber-sumber yang tersedia. Peneliti melakukan penelitian dalam jangka waktu 2015-2018 dengan lingkup waktu hanya empat tahun penelitian hanya dilakukan dalam jangka waktu tersebut karena adanya keterbatasan waktu dan data.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai kemiskinan, dan anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Berhasil memberikan kesimpulan tersebut berupa :

1. Kemiskinan di Indonesia memiliki pengaruh negatif terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia, maka kemiskinan yang menurun menyebabkan angka partisipasi sekolah meningkat, dan pemerataan terhadap pendidikan di Indonesia.
2. Anggaran pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Kenaikan anggaran pendidikan dapat mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah di Indonesia.
3. Kemiskinan dan anggaran pendidikan secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa koefisien determinasi atau pengaruh kemiskinan, anggaran pendidikan mempengaruhi angka partisipasi sekolah sebesar 0,55 sehingga dengan demikian kemiskinan dan anggaran pendidikan mempengaruhi angka partisipasi sekolah secara simultan adalah sebesar 55%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat pengaruh kemiskinan dan anggaran pendidikan secara bersama-sama terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini adalah :

1. Kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap angka partisipasi sekolah. Hal ini disebabkan masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan tidak dapat melanjutkan pendidikan. Menurunnya angka kemiskinan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dengan menurunnya angka kemiskinan dapat mendukung program pemerintah dalam pemerataan pendidikan.
2. Anggaran pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap angka partisipasi sekolah. Meningkatnya anggaran pendidikan dapat memberikan efek baik pada pemerataan pendidikan, dan juga terdistribusinya anggaran pendidikan dengan tepat dapat mendukung partisipasi sekolah di Indonesia.
3. Kemiskinan dan anggaran pendidikan secara serampak dan signifikan mempengaruhi angka partisipasi sekolah di Indonesia. Variabel-variabel independen ini mampu menjelaskan pengaruh sebesar 55% terhadap variabel dependennya.

C. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sertakesimpulan yang sudah dikemukakan sebelumnya maka saran yang diberikan adalah :

1. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan masyarakat yang hidup dibawah garis kmiskinan, karena dengan menekan angka kemiskinan dapat mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah. Sehingga dengan menurunnya kemiskinan dapat mendukung pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia, selain hanya meningkatkan anggaran pendidikan, perlu memperhatikan distribusi anggaran serta bantuan lainnya dalam bentuk sarana prasarana, dan persebaran guru, agar tepat sasaran dan terdistribusi dengan baik. Tentunya hal tersebut diupayakam agar terciptanya pemerataan pendidikan ke seluruh provinsi dan daerah-daerah tepencil lainnya agar dapat merasakan pendidikan. Secara tidak langsung dengan meningkatkan anggran pendidikan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arze del Granado, F. J., Fengler, W., Ragatz, A., & Yafuz, E. (2007). *Investing in Indonesia's Education: Allocation, Equity and Efficiency of Public Expenditures* (Working Paper, 4329).
- Berg, V. Den. (2001). *Economic Growth and Development*.
- BPS. (2017a). *Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2017b). *Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi*. Jakarta.
- BPS. (2017c). *Rata-Rata Lama Sekolah*. Jakarta.
- Depdiknas. (2011). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah: Konsep dasar*. Jakarta.
- Dewi, V.R., S. Astutik, dan H. P. (2015). Penentuan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah Menggunakan Geographically Weighted Regression dengan Metode Stepwise. *Jurnal Mahasiswa Statistik*, 93–96.
- Djalal, F. dan D. S. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusantara.
- Dwi, E. (2010). Penyebab kemiskinan di Indonesia. Retrieved from www.tempatebo.co.cc
- Faguet, J-P. dan Sanchez, F. (2006). *Decentralization's Effects on Educational Outcomes in Bolivia and Colombia*. World Development.
- Febri, M. (2015). Pemetaan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
- Garrison, Ray H. dan Noreen, E. W. (2000). *Akuntansi Manajerial. Terjemahan Totok Budisantoso. Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, A. (2004). *Sistem Pendanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Depatemen Pendidikan Nasional.
- Ginanjari, K. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: .PT. Pustaka Cidosindo.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gunawan, A. (2010). *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Berbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamdi, A. . (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harniati. (2010). Program-program Sektor Pertanian yang Berorientasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Hsiao, C. (2003). *Analysis of Panel Data Cambridge U*. Jakarta: Press.
- Indonesia, C. (2019). from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190313204741-532-377038/dilema-anggaran-jumbo-pendidikan-minim-hasil>

- Kemdikbud. (2018). *Neraca Pendidikan Daerah*. Jakarta.
- Kholis, N. (2014). Pendidikan Islam Dalam Usaha Mengatasi Kemiskinan,. Retrieved from download.portalgaruda.org/%0A%0A
- Kumalasari, M. (2011). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 19.
- Manurung, F. A., & Santoso, D. B. (2015). Pemetaan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(1), 1–10.
- Mikkelsen, B. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mubiyarto. (1995). *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta.
- Mudrajad, K. (2013). *Mudah Memahami dan menganalisis Indikator ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mudyahardjo, R. (2008). *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulfrod, Bill, Diana Kendall, John Ewington, Bill Edmunds, L. K. and H. S. (2008). Successful principalship of high-performance schools in high-poverty communities. *Journal of Educational Administration*. Vol. 46(4):, 461.
- Mulyasa. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Rosdakarya.
- Munandar, A. S. (2001). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Depok: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Nafarin, M. (n.d.). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nallari, R., & Griffith, B. (2011). Understanding Growth and Poverty.
- News, N. (2017). No Title.
- Nirwana, I. D. (2013). Pengaruh Variabel Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin: Studi pada 33 Provinsi di Indonesia, 6 Provinsi di Pulau Jawa dan 27 Provinsi di Luar Pulau Jawa pada Tahun 2006-2011. *Jurnal Ilmiah*, 1–9.
- Nurhayati, S. (2008). *Partisipasi Keluarga Miskin dan Manajemen Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Banjarnegara*. PPS UNY.
- Poerbakawatja, S. (1981). *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Prayitno, H. & L. A. (1986). *Petani Desa Dan Kemiskinan*. Yogyakarta: BPF.
- S, M. (2003). *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT. Rajagafindo Persada.
- Sarwoko. (2005). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Yogyakarta: ANDI.

- Smith, and Todaro. (2006). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Ke Sembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Stevenson A. (2010). Oxford Dictionary of English.
- Subandiyah Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partispasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pendidikan.
- Sudantoko, D dan H, M. (2009). *Dasar-Dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. PP. Mardi Mulya.
- Sugiyah. (2001). *Partisipasi Komita Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates Kabupaten Kulon Progo*. Tesis PPS-UNY
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung :Pusat Bahasa Depdiknas.
- Suharto, E. dkk. (2004). Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial, 87.
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Ctra Utama.
- Suparlan, P. (1995). *Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan Obor Indonesia*.
- Supriadi, D. (2010). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryono, A. (2001). *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan dan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, W. W. (2011). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta.
- Winarti, A. (2014). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- World Bank. (2018). Ikhtisar. Retrieved from <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian Angka Partisipasi Sekolah (APS), Kemiskinan (KMS), dan Anggaran Pendidikan (AGP)

No	Provinsi	Tahun	APS	KMS	AGP
1	ACEH	2015	81.43	17.11	1,134.76
2	ACEH	2016	81.82	16.43	976.22
3	ACEH	2017	82.15	15.92	2,723.38
4	ACEH	2018	82.92	15.68	3,028.05
5	SUMATERA UTARA	2015	76.23	10.79	222.8
6	SUMATERA UTARA	2016	76.43	10.27	173.86
7	SUMATERA UTARA	2017	76.76	9.28	2,277.60
8	SUMATERA UTARA	2018	77.41	8.94	2,766.68
9	SUMATERA BARAT	2015	82.53	6.71	137.46
10	SUMATERA BARAT	2016	82.62	7.14	154.15
11	SUMATERA BARAT	2017	82.86	6.75	1,898.47
12	SUMATERA BARAT	2018	83.08	6.55	2,124.66
13	RIAU	2015	75.57	8.82	650.21
14	RIAU	2016	75.68	7.67	800.91
15	RIAU	2017	76.52	7.41	2,377.97
16	RIAU	2018	77.27	7.21	2,057.03
17	JAMBI	2015	70.75	9.12	270.42
18	JAMBI	2016	71.20	8.37	226.38
19	JAMBI	2017	71.54	7.9	694.24
20	JAMBI	2018	71.94	7.85	934.47
21	SUMATERA SELATAN	2015	68.40	13.77	215.56
22	SUMATERA SELATAN	2016	68.67	13.39	83.59
23	SUMATERA SELATAN	2017	69.05	13.1	1,422.75
24	SUMATERA SELATAN	2018	69.65	12.82	1,161.80
25	BENGGKULU	2015	78.16	17.16	161.46
26	BENGGKULU	2016	78.37	17.03	161.02
27	BENGGKULU	2017	79.07	15.59	465.79
28	BENGGKULU	2018	79.33	15.41	685.7
29	LAMPUNG	2015	69.04	13.53	316.85
30	LAMPUNG	2016	69.31	13.86	186.37
31	LAMPUNG	2017	70.03	13.04	1,117.71
32	LAMPUNG	2018	70.83	13.01	1,523.61
33	KEP. BANGKA BELITUNG	2015	66.17	4.83	41.28
34	KEP. BANGKA BELITUNG	2016	66.35	5.04	63.43
35	KEP. BANGKA BELITUNG	2017	66.99	5.3	450.42
36	KEP. BANGKA BELITUNG	2018	67.11	4.77	475.32
37	KEP. RIAU	2015	81.84	5.78	650.21

38	KEP. RIAU	2016	82.04	5.84	800.91
39	KEP. RIAU	2017	82.80	6.13	2,377.97
40	KEP. RIAU	2018	83.78	5.83	623.74
41	DKI JAKARTA	2015	70.73	3.61	11,567.41
42	DKI JAKARTA	2016	70.83	3.75	12,221.11
43	DKI JAKARTA	2017	71.50	3.78	14,179.23
44	DKI JAKARTA	2018	71.81	3.55	14,928.89
45	JAWA BARAT	2015	65.72	9.57	417.54
46	JAWA BARAT	2016	65.82	8.77	617.33
47	JAWA BARAT	2017	66.62	7.83	4,537.53
48	JAWA BARAT	2018	67.17	7.25	6,443.22
49	JAWA TENGAH	2015	67.66	13.32	312.89
50	JAWA TENGAH	2016	67.95	13.19	497.31
51	JAWA TENGAH	2017	68.48	12.23	4,717.41
52	JAWA TENGAH	2018	69.02	11.19	5,725.24
53	DI YOGYAKARTA	2015	86.78	13.16	300.35
54	DI YOGYAKARTA	2016	87.20	13.1	351.51
55	DI YOGYAKARTA	2017	87.61	12.36	1,186.50
56	DI YOGYAKARTA	2018	88.39	11.81	1,332.37
57	JAWA TIMUR	2015	70.44	12.28	431.29
58	JAWA TIMUR	2016	70.54	11.85	300.34
59	JAWA TIMUR	2017	71.51	11.2	4,817.73
60	JAWA TIMUR	2018	72.18	10.85	5,353.45
61	BANTEN	2015	66.73	5.75	330.59
62	BANTEN	2016	67.00	5.36	396.35
63	BANTEN	2017	67.77	5.59	1,219.17
64	BANTEN	2018	68.35	5.25	1,888.14
65	BALI	2015	81.69	5.25	200.16
66	BALI	2016	81.98	4.15	182.43
67	BALI	2017	82.16	4.14	1,355.70
68	BALI	2018	82.35	3.91	1,299.90
69	NUSA TENGGARA BARAT	2015	75.86	16.54	46.88
70	NUSA TENGGARA BARAT	2016	76.24	16.02	85.95
71	NUSA TENGGARA BARAT	2017	76.61	15.05	994.91
72	NUSA TENGGARA BARAT	2018	76.89	14.63	1,184.61
73	NUSA TENGGARA TIMUR	2015	74.25	22.58	51.23
74	NUSA TENGGARA TIMUR	2016	74.56	22.01	69.95
75	NUSA TENGGARA TIMUR	2017	74.65	21.38	1,067.00
76	NUSA TENGGARA TIMUR	2018	74.83	21.03	1,154.35
77	KALIMANTAN BARAT	2015	66.83	8.44	139.81
78	KALIMANTAN BARAT	2016	67.16	8	150.95

79	KALIMANTAN BARAT	2017	67.53	7.86	933.87
80	KALIMANTAN BARAT	2018	68.35	7.37	776.67
81	KALIMANTAN TENGAH	2015	66.00	5.91	169.35
82	KALIMANTAN TENGAH	2016	66.12	5.36	113.05
83	KALIMANTAN TENGAH	2017	66.62	5.26	827.35
84	KALIMANTAN TENGAH	2018	66.95	5.1	793.17
85	KALIMANTAN SELATAN	2015	67.49	4.72	437.23
86	KALIMANTAN SELATAN	2016	67.91	4.52	450.59
87	KALIMANTAN SELATAN	2017	68.30	4.7	1,010.56
88	KALIMANTAN SELATAN	2018	68.66	4.65	864.37
89	KALIMANTAN TIMUR	2015	80.68	6.1	322.28
90	KALIMANTAN TIMUR	2016	80.81	6	338.59
91	KALIMANTAN TIMUR	2017	81.32	6.08	1,179.48
92	KALIMANTAN TIMUR	2018	81.55	6.06	1,089.21
93	KALIMANTAN UTARA	2015	74.41	6.32	60.52
94	KALIMANTAN UTARA	2016	74.72	6.99	57.88
95	KALIMANTAN UTARA	2017	75.12	6.96	339.89
96	KALIMANTAN UTARA	2018	75.62	6.86	344.83
97	SULAWESI UTARA	2015	72.22	8.98	84.54
98	SULAWESI UTARA	2016	72.57	8.2	95.4
99	SULAWESI UTARA	2017	73.04	7.9	847.08
100	SULAWESI UTARA	2018	73.67	7.59	959.27
101	SULAWESI TENGAH	2015	73.80	14.07	123.5
102	SULAWESI TENGAH	2016	73.96	14.09	165.77
103	SULAWESI TENGAH	2017	74.87	14.22	836.55
104	SULAWESI TENGAH	2018	75.05	13.69	820.48
105	SULAWESI SELATAN	2015	69.66	10.12	148.32
106	SULAWESI SELATAN	2016	70.09	9.24	144.55
107	SULAWESI SELATAN	2017	70.60	9.48	2,118.61
108	SULAWESI SELATAN	2018	70.81	8.87	2,594.14
109	SULAWESI TENGGARA	2015	72.42	13.74	81.37
110	SULAWESI TENGGARA	2016	72.67	12.77	74.53
111	SULAWESI TENGGARA	2017	72.94	11.97	876.38
112	SULAWESI TENGGARA	2018	73.47	11.32	1,049.18
113	GORONTALO	2015	69.03	18.16	98.77
114	GORONTALO	2016	69.12	17.63	96.53
115	GORONTALO	2017	69.86	17.14	356.95
116	GORONTALO	2018	70.75	15.83	422.55
117	SULAWESI BARAT	2015	67.14	11.9	70.03
118	SULAWESI BARAT	2016	67.34	11.19	139.54
119	SULAWESI BARAT	2017	68.03	11.18	288.32

120	SULAWESI BARAT	2018	68.69	11.22	311.82
121	MALUKU	2015	77.87	19.36	164.84
122	MALUKU	2016	78.19	19.26	180.84
123	MALUKU	2017	79.08	18.29	357.5
124	MALUKU	2018	79.12	17.85	745.29
125	MALUKU UTARA	2015	75.16	6.22	104.13
126	MALUKU UTARA	2016	75.58	6.41	189.5
127	MALUKU UTARA	2017	76.06	6.44	469.05
128	MALUKU UTARA	2018	76.36	6.62	466.24
129	PAPUA BARAT	2015	79.99	25.73	88.78
130	PAPUA BARAT	2016	80.28	24.88	153.74
131	PAPUA BARAT	2017	80.60	23.12	464.82
132	PAPUA BARAT	2018	80.81	22.66	568.27
133	PAPUA	2015	61.96	28.4	100.39
134	PAPUA	2016	62.07	28.4	176.52
135	PAPUA	2017	63.35	27.76	552.45
136	PAPUA	2018	63.48	27.43	320.5

Lampiran 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Kemiskinan (KMS), dan Anggaran Pendidikan (AGP) dalam bentuk log

	Provinsi	Tahun	LOG(APS)	LOG(KMS)	LOG(AGP)
1	ACEH	2015	1.9107844	1.23325001	3.054904019
2	ACEH	2016	1.9128595	1.21563756	2.989547701
3	ACEH	2017	1.9146076	1.20194306	3.435108244
4	ACEH	2018	1.9186593	1.19534606	3.481163042
5	SUMATERA UTARA	2015	1.8821259	1.03302144	2.347915187
6	SUMATERA UTARA	2016	1.8832639	1.01157044	2.240199675
7	SUMATERA UTARA	2017	1.885135	0.96754798	3.357477454
8	SUMATERA UTARA	2018	1.8887971	0.95133752	3.441958931
9	SUMATERA BARAT	2015	1.9166118	0.82672252	2.13817634
10	SUMATERA BARAT	2016	1.9170852	0.85369821	2.187943529
11	SUMATERA BARAT	2017	1.9183449	0.82930377	3.278403739
12	SUMATERA BARAT	2018	1.9194965	0.8162413	3.327289442
13	RIAU	2015	1.8783494	0.94546859	2.813053645
14	RIAU	2016	1.8789811	0.88479536	2.903583716
15	RIAU	2017	1.883775	0.86981821	3.376206371
16	RIAU	2018	1.8880109	0.85793526	3.313240626
17	JAMBI	2015	1.8497264	0.95999484	2.432038808
18	JAMBI	2016	1.85248	0.92272546	2.354838056
19	JAMBI	2017	1.8545489	0.89762709	2.841509633
20	JAMBI	2018	1.8569704	0.89486966	2.970565363
21	SUMATERA SELATAN	2015	1.8350561	1.13893394	2.333568175
22	SUMATERA SELATAN	2016	1.836767	1.12678058	1.922154325
23	SUMATERA SELATAN	2017	1.8391637	1.1172713	3.153128594
24	SUMATERA SELATAN	2018	1.8429211	1.10788803	3.065131372
25	BENGGULU	2015	1.8929846	1.23451728	2.208064948
26	BENGGULU	2016	1.8941498	1.23121465	2.206879822
27	BENGGULU	2017	1.8980117	1.19284612	2.66819016
28	BENGGULU	2018	1.8994375	1.18780264	2.836134149
29	LAMPUNG	2015	1.8391008	1.1312978	2.500853711
30	LAMPUNG	2016	1.8407959	1.14176323	2.270376005
31	LAMPUNG	2017	1.8452841	1.11527759	3.048329137
32	LAMPUNG	2018	1.8502172	1.1142773	3.182873814
33	KEP. BANGKA BELITUNG	2015	1.8206611	0.68394713	1.615739689
34	KEP. BANGKA BELITUNG	2016	1.8218409	0.70243054	1.802294711
35	KEP. BANGKA BELITUNG	2017	1.82601	0.72427587	2.653617666
36	KEP. BANGKA BELITUNG	2018	1.8267872	0.67851838	2.676986088
37	KEP. RIAU	2015	1.9129656	0.76192784	2.813053645

38	KEP. RIAU	2016	1.9140257	0.76641285	2.903583716
39	KEP. RIAU	2017	1.9180303	0.78746047	3.376206371
40	KEP. RIAU	2018	1.9231404	0.76566855	2.795003596
41	DKI JAKARTA	2015	1.8496037	0.5575072	4.063236129
42	DKI JAKARTA	2016	1.8502172	0.57403127	4.087110653
43	DKI JAKARTA	2017	1.854306	0.5774918	4.151652647
44	DKI JAKARTA	2018	1.8561849	0.55022835	4.174027518
45	JAWA BARAT	2015	1.8176976	0.98091194	2.620698087
46	JAWA BARAT	2016	1.8183579	0.94299959	2.790517383
47	JAWA BARAT	2017	1.8236046	0.89376176	3.656819509
48	JAWA BARAT	2018	1.8271753	0.86033801	3.80910296
49	JAWA TENGAH	2015	1.830332	1.12450422	2.495391683
50	JAWA TENGAH	2016	1.8321895	1.1202448	2.696627192
51	JAWA TENGAH	2017	1.8355638	1.08742646	3.673703623
52	JAWA TENGAH	2018	1.838975	1.04883009	3.757793697
53	DI YOGYAKARTA	2015	1.9384196	1.11925589	2.477627636
54	DI YOGYAKARTA	2016	1.9405165	1.1172713	2.545937685
55	DI YOGYAKARTA	2017	1.9425537	1.09201847	3.074267743
56	DI YOGYAKARTA	2018	1.9464031	1.0722499	3.124624845
57	JAWA TIMUR	2015	1.8478193	1.08919837	2.634769389
58	JAWA TIMUR	2016	1.8484355	1.07371835	2.477613176
59	JAWA TIMUR	2017	1.8543668	1.04921802	3.682842457
60	JAWA TIMUR	2018	1.8584169	1.03542974	3.728633751
61	BANTEN	2015	1.8243211	0.75966784	2.519289712
62	BANTEN	2016	1.8260748	0.72916479	2.598078863
63	BANTEN	2017	1.8310375	0.74741181	3.086064267
64	BANTEN	2018	1.8347385	0.7201593	3.276034193
65	BALI	2015	1.9121689	0.7201593	2.301377292
66	BALI	2016	1.9137079	0.6180481	2.261096258
67	BALI	2017	1.9146604	0.61700034	3.132163596
68	BALI	2018	1.9156636	0.59217676	3.113909944
69	NUSA TENGGARA BARAT	2015	1.8800128	1.21853551	1.670987603
70	NUSA TENGGARA BARAT	2016	1.8821829	1.20466251	1.934245881
71	NUSA TENGGARA BARAT	2017	1.8842855	1.1775365	2.997783796
72	NUSA TENGGARA BARAT	2018	1.8858699	1.16524433	3.073575394
73	NUSA TENGGARA TIMUR	2015	1.8706965	1.35372394	1.709524356
74	NUSA TENGGARA TIMUR	2016	1.8725059	1.34262004	1.844787719
75	NUSA TENGGARA TIMUR	2017	1.8730298	1.3300077	3.028164419
76	NUSA TENGGARA TIMUR	2018	1.8740757	1.32283927	3.062337507
77	KALIMANTAN BARAT	2015	1.8249715	0.92634245	2.145538236
78	KALIMANTAN BARAT	2016	1.8271107	0.90308999	2.178833117

79	KALIMANTAN BARAT	2017	1.8294967	0.89542255	2.970286424
80	KALIMANTAN BARAT	2018	1.8347385	0.86746749	2.89023653
81	KALIMANTAN TENGAH	2015	1.8195439	0.77158748	2.228785201
82	KALIMANTAN TENGAH	2016	1.8203328	0.72916479	2.053270567
83	KALIMANTAN TENGAH	2017	1.8236046	0.72098574	2.917689271
84	KALIMANTAN TENGAH	2018	1.8257506	0.70757018	2.89936628
85	KALIMANTAN SELATAN	2015	1.8292394	0.673942	2.640709953
86	KALIMANTAN SELATAN	2016	1.8319337	0.65513843	2.653781549
87	KALIMANTAN SELATAN	2017	1.8344207	0.67209786	3.004562104
88	KALIMANTAN SELATAN	2018	1.8367038	0.66745295	2.936699685
89	KALIMANTAN TIMUR	2015	1.9067659	0.78532984	2.508233355
90	KALIMANTAN TIMUR	2016	1.9074651	0.77815125	2.529674127
91	KALIMANTAN TIMUR	2017	1.9101974	0.78390358	3.071690581
92	KALIMANTAN TIMUR	2018	1.911424	0.78247262	3.037111162
93	KALIMANTAN UTARA	2015	1.8716313	0.80071708	1.781898919
94	KALIMANTAN UTARA	2016	1.8734369	0.84447718	1.762528522
95	KALIMANTAN UTARA	2017	1.8757556	0.84260924	2.531338387
96	KALIMANTAN UTARA	2018	1.8786367	0.83632412	2.537605042
97	SULAWESI UTARA	2015	1.8586575	0.95327634	1.927062243
98	SULAWESI UTARA	2016	1.8607571	0.91381385	1.979548375
99	SULAWESI UTARA	2017	1.8635608	0.89762709	2.927924428
100	SULAWESI UTARA	2018	1.8672907	0.88024178	2.981940863
101	SULAWESI TENGAH	2015	1.8680564	1.1482941	2.091666958
102	SULAWESI TENGAH	2016	1.8689969	1.14891099	2.219505937
103	SULAWESI TENGAH	2017	1.8743078	1.1528996	2.922491904
104	SULAWESI TENGAH	2018	1.8753507	1.13640345	2.914067999
105	SULAWESI SELATAN	2015	1.8429835	1.00518051	2.171199717
106	SULAWESI SELATAN	2016	1.8456561	0.96567197	2.160018096
107	SULAWESI SELATAN	2017	1.8488047	0.97680834	3.326051018
108	SULAWESI SELATAN	2018	1.8500946	0.94792362	3.41399341
109	SULAWESI TENGGARA	2015	1.8598585	1.13798673	1.910464316
110	SULAWESI TENGGARA	2016	1.8613552	1.1061909	1.872331121
111	SULAWESI TENGGARA	2017	1.8629658	1.07809415	2.942692458
112	SULAWESI TENGGARA	2018	1.86611	1.05384643	3.020850003
113	GORONTALO	2015	1.8390379	1.25911584	1.994625054
114	GORONTALO	2016	1.8396037	1.24625231	1.984662306
115	GORONTALO	2017	1.8442286	1.23401082	2.552607386
116	GORONTALO	2018	1.8497264	1.19948091	2.625878106
117	SULAWESI BARAT	2015	1.8269813	1.07554696	1.845284126
118	SULAWESI BARAT	2016	1.8282731	1.04883009	2.144698719
119	SULAWESI BARAT	2017	1.8327005	1.0484418	2.459874769

120	SULAWESI BARAT	2018	1.8368935	1.04999286	2.493903967
121	MALUKU	2015	1.8913702	1.28690535	2.217062606
122	MALUKU	2016	1.8931512	1.28465628	2.257294498
123	MALUKU	2017	1.8980667	1.26221371	2.553276046
124	MALUKU	2018	1.8982863	1.25163822	2.872325294
125	MALUKU UTARA	2015	1.8759868	0.79379038	2.017575868
126	MALUKU UTARA	2016	1.8784069	0.80685803	2.277609214
127	MALUKU UTARA	2017	1.8811563	0.80888587	2.67121914
128	MALUKU UTARA	2018	1.8828659	0.82085799	2.66860953
129	PAPUA BARAT	2015	1.9030357	1.41043979	1.948315141
130	PAPUA BARAT	2016	1.9046074	1.39585038	2.186786877
131	PAPUA BARAT	2017	1.906335	1.36398783	2.667284806
132	PAPUA BARAT	2018	1.9074651	1.35525991	2.754554729
133	PAPUA	2015	1.7921114	1.45331834	2.001690454
134	PAPUA	2016	1.7928817	1.45331834	2.246793919
135	PAPUA	2017	1.8017466	1.44341946	2.742292978
136	PAPUA	2018	1.8026369	1.43822581	2.505828034

Lampiran 3. Statistik Deskriptif Data

	LOG(APS)	LOG(KMS)	LOG(AGP)
Mean	1.865806	0.989733	2.694128
Median	1.862160	0.978860	2.667737
Maximum	1.946403	1.453318	4.174028
Minimum	1.792111	0.550228	1.615740
Std. Dev.	0.035075	0.225496	0.565014
Skewness	0.223034	0.070837	0.362696
Kurtosis	2.172948	2.139869	2.763085
Jarque-Bera	5.003617	4.306088	3.299827
Probability	0.081937	0.116130	0.192067
Sum	253.7497	134.6037	366.4014
Sum Sq. Dev.	0.166082	6.864534	43.09745
Observations	136	136	136

Lampiran 4. Model *Comen Effect*

Dependent Variable: LOG(APS)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/13/19 Time: 11:56
 Sample: 2015 2018
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 136

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.834661	0.023183	79.13791	0.0000
LOG(KMS)	0.011137	0.013929	0.799560	0.4254
LOG(AGP)	0.007469	0.005559	1.343626	0.1814
R-squared	0.014844	Mean dependent var		1.865806
Adjusted R-squared	0.000030	S.D. dependent var		0.035075
S.E. of regression	0.035074	Akaike info criterion		-3.840890
Sum squared resid	0.163616	Schwarz criterion		-3.776641
Log likelihood	264.1805	Hannan-Quinn criter.		-3.814781
F-statistic	1.002020	Durbin-Watson stat		0.502217
Prob(F-statistic)	0.369891			

Lampiran 5. Model *Fix Effect*

Dependent Variable: LOG(APS)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/13/19 Time: 11:58
 Sample: 2015 2018
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 136

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.887903	0.012171	155.1099	0.0000
LOG(KMS)	-0.034888	0.011176	-3.121633	0.0024
LOG(AGP)	0.004615	0.000602	7.665156	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.997054	Mean dependent var	1.865806
Adjusted R-squared	0.996023	S.D. dependent var	0.035075
S.E. of regression	0.002212	Akaike info criterion	-9.168051
Sum squared resid	0.000489	Schwarz criterion	-8.397055
Log likelihood	659.4275	Hannan-Quinn criter.	-8.854738
F-statistic	967.0816	Durbin-Watson stat	2.047833
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 6. Model *Random Effect*

Dependent Variable: LOG(APS)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/13/19 Time: 12:00
 Sample: 2015 2018
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 136
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.881250	0.012927	145.5279	0.0000
LOG(KMS)	-0.028739	0.010397	-2.764218	0.0065
LOG(AGP)	0.004825	0.000586	8.238511	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.036235	0.9963
Idiosyncratic random		0.002212	0.0037

Weighted Statistics			
R-squared	0.557443	Mean dependent var	0.056920
Adjusted R-squared	0.550788	S.D. dependent var	0.003304
S.E. of regression	0.002214	Sum squared resid	0.000652
F-statistic	83.76304	Durbin-Watson stat	1.773696
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	-0.046660	Mean dependent var	1.865806
Sum squared resid	0.173831	Durbin-Watson stat	0.513213

Lampiran 7. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1010.421927	(33,100)	0.0000
Cross-section Chi-square	790.493908	33	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(APS)

Method: Panel Least Squares

Date: 07/13/19 Time: 11:59

Sample: 2015 2018

Periods included: 4

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 136

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.834661	0.023183	79.13791	0.0000
LOG(KMS)	0.011137	0.013929	0.799560	0.4254
LOG(AGP)	0.007469	0.005559	1.343626	0.1814
R-squared	0.014844	Mean dependent var		1.865806
Adjusted R-squared	0.000030	S.D. dependent var		0.035075
S.E. of regression	0.035074	Akaike info criterion		-3.840890
Sum squared resid	0.163616	Schwarz criterion		-3.776641
Log likelihood	264.1805	Hannan-Quinn criter.		-3.814781
F-statistic	1.002020	Durbin-Watson stat		0.502217
Prob(F-statistic)	0.369891			

Lampiran 8. Uji Hausmen

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.277691	2	0.3202

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(KMS)	-0.034888	-0.028739	0.000017	0.1337
LOG(AGP)	0.004615	0.004825	0.000000	0.1313

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOGAPS

Method: Panel Least Squares

Date: 07/13/19 Time: 12:01

Sample: 2015 2018

Periods included: 4

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 136

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.887903	0.012171	155.1099	0.0000
LOG(KMS)	-0.034888	0.011176	-3.121633	0.0024
LOG(AGP)	0.004615	0.000602	7.665156	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.997054	Mean dependent var	1.865806
Adjusted R-squared	0.996023	S.D. dependent var	0.035075
S.E. of regression	0.002212	Akaike info criterion	-9.168051
Sum squared resid	0.000489	Schwarz criterion	-8.397055
Log likelihood	659.4275	Hannan-Quinn criter.	-8.854738
F-statistic	967.0816	Durbin-Watson stat	2.047833
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 9. Uji LM

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 07/13/19 Time: 12:07

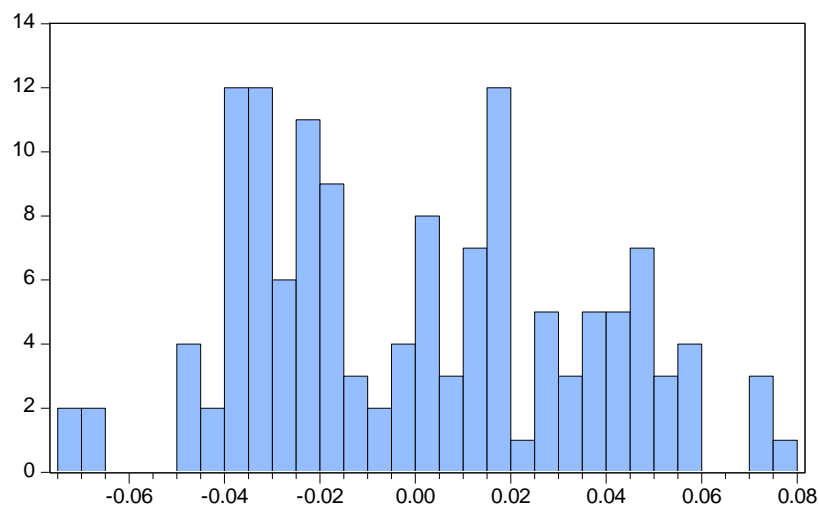
Sample: 2015 2018

Total panel observations: 136

Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	201.9814 (0.0000)	1.929066 (0.1649)	203.9105 (0.0000)
Honda	14.21202 (0.0000)	-1.388908 (0.9176)	9.067307 (0.0000)
King-Wu	14.21202 (0.0000)	-1.388908 (0.9176)	2.772877 (0.0028)
GHM	-- --	-- --	201.9814 (0.0000)

Lampiran 10. Uji Normalitas



Lampiran 11. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 07/13/19 Time: 15:28

Sample: 1 136

Included observations: 136

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000537	59.41633	NA
LOGKMS	0.000194	22.09288	1.082600
LOGAGP	3.09E-05	25.87918	1.082600

Lampiran 12. Uji Heteroskedesitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.621733	Prob. F(2,133)	0.5386
Obs*R-squared	1.259737	Prob. Chi-Square(2)	0.5327
Scaled explained SS	0.715083	Prob. Chi-Square(2)	0.6994

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 07/13/19 Time: 15:30

Sample: 1 136

Included observations: 136

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000804	0.000454	1.770027	0.0790
LOG_KMS_^2	0.000291	0.000261	1.114173	0.2672
LOG_AGP_^2	1.32E-05	3.71E-05	0.354734	0.7234
R-squared	0.009263	Mean dependent var		0.001203
Adjusted R-squared	-0.005636	S.D. dependent var		0.001316
S.E. of regression	0.001319	Akaike info criterion		-10.40158
Sum squared resid	0.000232	Schwarz criterion		-10.33733
Log likelihood	710.3076	Hannan-Quinn criter.		-10.37547
F-statistic	0.621733	Durbin-Watson stat		0.535358
Prob(F-statistic)	0.538566			

Lampiran 13. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.790943	Prob. F(2,129)	0.0651
Obs*R-squared	5.599227	Prob. Chi-Square(2)	0.0608

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/13/19 Time: 15:32

Sample: 2 136

Included observations: 135

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.002799	0.022208	-0.126049	0.8999
LOG_KMS_	0.003189	0.016402	0.194394	0.8462
LOG_AGP_	0.000799	0.003593	0.222313	0.8244
AR(1)	-0.202975	0.103613	-1.958973	0.0523
RESID(-1)	0.276528	0.128865	2.145870	0.0338
RESID(-2)	0.215810	0.116974	1.844945	0.0673
R-squared	0.041476	Mean dependent var		-9.06E-13
Adjusted R-squared	0.004324	S.D. dependent var		0.023151
S.E. of regression	0.023101	Akaike info criterion		-4.654441
Sum squared resid	0.068843	Schwarz criterion		-4.525318
Log likelihood	320.1748	Hannan-Quinn criter.		-4.601969
F-statistic	1.116377	Durbin-Watson stat		2.049120
Prob(F-statistic)	0.354937			

Riwayat Hidup



Nadira Zahra, lahir di Tangerang 23 Januari 1997. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hasan Basri dan Ida Tusaidah. Bertempat tinggal di Jl. Raden Saleh 01/01 no.16

Karang Tengah, Tangerang-Banten. Pendidikan yang telah ditempuh yaitu TPA Al-Ikhlas (2002-2003) ; SDI Ar-Rahman (2003-2009) ; MTsN Cipondoh (2009-2012) ; MAN 10 Jakarta (2012-2015). Penulis merupakan mahasiswi Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Penulis pernah melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Koperasi Keluarga Guru Jakarta di bidang Informasi dan Teknologi. Selain itu penulis juga melakukan Praktik Kegiatan Mengajar di SMAN 31 Jakarta Timur sebagai Guru Ekonomi kelas 10, Pengalaman mengajar pada Tk Keliling UNJ, Pengalaman mengajar sebagai Guru Ekonomi di MAN 10 Jakarta di kelas 10 lintas minat dan kelas 11 peminatan.